

**PERAN REGULASI PERBANKAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19**



Tesis diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Manajemen

Oleh:

Fauzia Yuni Rahmawati
P 32 2019 00682

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG
2021**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

PENGESAHAN STATUS TESIS


JUDUL : PERAN REGULASI PERBANKAN PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Saya,
mengizinkan Tesis Magister Manajemen ini disimpan di Perpustakaan Universitas
Dian Nuswantoro dengan syarat-syarat kegunaan sebagai berikut:

1. Tesis adalah milik Universitas Dian Nuswantoro
2. Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro dibenarkan membuat salinan untuk tujuan referensi saja
3. Perpustakaan juga dibenarkan membuat salinan Tesis ini sebagai bahan pertukaran antar institusi pendidikan tinggi
4. Kategori Tesis

	Sangat Rahasia: mengandung isi tentang keselamatan atau kepentingan negara Indonesia
	Rahasia: mengandung isi tentang kerahasiaan dari suatu organisasi/badan di mana penelitian Tesis ini dikerjakan
✓	Biasa


(Fauzia Yuni Rahmawati)

Disahkan oleh:

(Dr. Herry Subagyo, MM)

Alamat Tetap:
Jl. Candi Prambanan Timur 4 no 4

Tanggal: Agustus 2021



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL TESIS : PERAN REGULASI PERBANKAN PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19

PENYUSUN : Fauzia Yuni Rahmawati

NPM : P 32 2019 00682

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Tesis ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Manajemen saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”

Semarang, 21 Agustus 2021

Fauzia Yuni Rahmawati
Penulis



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL TESIS : PERAN REGULASI PERBANKAN PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19
NAMA : Fauzia Yuni Rahmawati
NPM : P 32 2019 00682

Tesis ini telah diperiksa dan disetujui,

Semarang, 21 Agustus 2021

Dr. Herry Subagyo, MM

Pembimbing I

Dr. Nila Tristiarini, SE, MSi, CSRA

Pembimbing II

Mengetahui,

Prof. Vincent Didiek Wiet Aryanto MBA, Ph.D

Dekan



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

PENGESAHAN TESIS

JUDUL TESIS : PERAN REGULASI PERBANKAN PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19
NAMA : Fauzia Yuni Rahmawati
NPM : P 32 2019 00682

Tesis ini telah diujikan dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Sidang Tesis tanggal 23 Agustus 2021 Menurut pandangan kami, Tesis ini memadai dari segi kualitas maupun kuantitas untuk tujuan penganugerahan gelar Magister Manajemen (MM)

Semarang, 23 Agustus 2021

Dewan Penguji:

Prof. Dr. Amron, SE, MM

Ketua Penguji

Dr. E Artha Febriana, SE, MBA

Anggota

Dr. Yohan Wismantoro, SE, MM

Anggota

ABSTRACT

The development of the spread of coronavirus disease 2019 (Covid-19) has a direct or indirect impact on the performance and capacity of debtors, thus potentially disrupting banking performance, including Islamic banking and financial system stability, which can affect economic growth. This study aims to determine the role and assess the effectiveness of regulations issued by the government on Islamic banking in Indonesia during the COVID-19 pandemic, namely POJK No.11/POJK.03/2020 in the form of a national economic stimulus as a countercyclical policy for the impact of the spread of covid 19 in Indonesia and the role of POJK regulation Number 19/POJK.03/2014 regarding officeless financial services in the context of inclusive finance.

This study uses a quantitative approach and secondary data based on time series. The data used includes 11 Islamic commercial banks in Indonesia obtained from purposive sampling technique during the first quarter of 2020 to the first quarter of 2021. The variables included are financing, CAR, NPF, ROA, BOPO, FDR, exchange rate, inflation, the amount of money in circulation and the implementation of branchless banking. The data analysis method used in this study used multiple regression analysis and hypothesis testing using t-statistics to test the partial regression coefficients and F-statistics. In addition, the classical assumption test was also carried out which included normality test, multicollinearity test and autocorrelation test.

Based on the analysis that has been done in the study, it can be concluded that ROA, BOPO and the implementation of Branchless Banking have a significant effect on financing. Meanwhile, CAR, NPF, FDR, Inflation, Exchange Rate and Money Supply have no effect on financing. The results of this study indicate that the stimulus regulation has a positive role in the performance of Islamic banking in Indonesia during the COVID-19 pandemic.

Keywords : covid 19, banking regulation, bank stimulus, branchless banking, sharia banking

ABSTRAK

Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan termasuk perbankan syariah dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan menilai efektivitas regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada perbankan syariah di Indonesia di masa pandemi covid 19, yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 berupa stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid 19 di Indonesia dan peran regulasi POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder berdasarkan *time series*. Data yang digunakan mencakup 11 bank umum syariah di Indonesia yang diperoleh dari teknik purposive sampling selama periode triwulan 1 tahun 2020 sampai dengan triwulan 1 tahun 2021. Variabel yang dimasukkan adalah Pembiayaan, CAR, NPF, ROA, BOPO, FDR, nilai tukar, inflasi, jumlah uang yang beredar dan penerapan branchless banking. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F statistik. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa ROA, BOPO dan penerapan Branchless Banking berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan CAR, NPF, FDR, Inflasi, Nilai Tukar dan Jumlah Uang beredar tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi stimulus berperan positif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia pada masa pandemi covid 19.

Kata kunci : covid 19, regulasi perbankan, stimulus bank, branchless banking, perbankan syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji yukur kepada Allah atas berkat dan rahmatNya sehingga tesis yang berjudul “Peran Regulasi Perbankan pada Perbankan Syariah di Indonesia” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Manajemen Universitas Dian Nuswantoro. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu diharapkan bagi penulis yang akan datang untuk dapat mengembangkan penelitian ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom. selaku Rektor Universitas Dian Nuswantoro sekaligus pembimbing yang berkenan membimbing dan memberikan saran-saran dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Prof. Vincent Didiek Wiet Aryanto, MBA, PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro yang memberikan fasilitas dan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Universitas Dian Nuswantoro.
3. Bapak Dr. Yohan Wismantoro, MM. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro yang senantiasa memberikan dorongan semangat.
4. Bapak Dr. Herry Subagyo, MM dan Ibu Dr. Nila Tristiarini, SE, MSi, CSRA, selaku pembimbing yang memberikan banyak masukan, saran, dorongan dan perhatian selama saya belajar hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh dosen dan pengelola Program Studi Program Magister Manajemen Universitas Dian Nuswantoro yang telah memberikan tambahan pengetahuan, membimbing, mengarahkan dan memberikan dukungan selama masa kuliah maupun dalam penyusunan tesis ini. Serta segenap staf admisi pengelola Program Magister Manajemen Universitas Dian Nuswantoro yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi penulis selama mengikuti pendidikan.

6. Orang tua tersayang, suami serta anak-anakku tercinta yang telah menjadi penyemangat serta mendoakan penulis demi kelancaran selama mengikuti pendidikan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Dian Nuswantoro Angkatan 25, yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kebersamaan yang baik selama kuliah.
8. Teman – teman pereva atas doa, bantuan dan dukungan serta pengertian yang diberikan kepada penulis demi kelancaran pendidikan.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, yang turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan. Akhir kata, teriring harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna.

Semarang, Agustus 2021

Penulis,



Fauzia Yuni Rahmawati

DAFTAR ISI

PENGESAHAN STATUS TESIS	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
 BAB II	
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN	
DAN HIPOTESIS	17
2.1 Kajian Pustaka	17
2.1.1 Dampak langsung regulasi terhadap kinerja bank	17
2.1.1.1 Capital Adequacy Ratio (CAR)	18
2.1.1.2 Non Performing Financing (NPF)	21
2.1.2 Faktor fundamental bank lain terhadap kinerja bank	23
2.1.2.1 Return On Assets (ROA)	23

2.1.2.2	Financing to Deposit Ratio (FDR)	24
2.1.2.3	Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)	26
2.1.3	Kebijakan Makroprudensial terhadap kinerja bank	28
2.1.3.1	Inflasi	28
2.1.3.2	Nilai Tukar	30
2.1.3.3	Jumlah uang yang beredar	32
2.1.4	Branchless Banking / Laku Pandai	35
2.2	Telaah Penelitian Sebelumnya	38
2.2.1	Dampak Langsung Regulasi Terhadap Kinerja Bank	38
2.2.2	Faktor Fundamental Bank Lain terhadap kinerja bank	40
2.2.3	Kebijakan Makroprudensial terhadap kinerja bank	41
2.2.4	Branchless Banking / Laku Pandai	42
2.3	Kerangka Pemikiran Penelitian dan Hipotesis	43
2.3.1	Kerangka Pemikiran Penelitian	43
2.3.1.1	Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan	44
2.3.1.2	Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan	45
2.3.1.3	Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan	47
2.3.1.4	Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan	48
2.3.1.5	Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan	49
2.3.1.6	Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan	49
2.3.1.7	Pengaruh Nilai Tukar terhadap Pembiayaan	50
2.3.1.8	Pengaruh Jumlah Uang yang beredar terhadap Pembiayaan	51
2.3.1.9	Pengaruh Branchless Banking / Laku Pandai terhadap Pembiayaan	52
2.3.2	Hipotesis	55

BAB III

METODE PENELITIAN	57
3.1 Rancangan Penelitian	57
3.2 Populasi dan Sample	58
3.3 Definisi Operasional Variabel	61
3.4 Metode Pengumpulan Data	66
3.5 Analisis Data	66
3.5.1 Uji Deskriptif	66
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	67
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda	69
3.5.4 Uji Hipotesis	69

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Deskripsi Data	72
4.2 Analisis Data	89
4.2.1 Uji Deskriptif	86
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	94
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	100
4.3 Pengujian hipotesis	103
4.4 Pembahasan	110

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis	54
------------	-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar ROA, CAR, NPF, FDR dan BOPO Bank Umum Syariah Tahun 2008 – Q2021	7
Tabel 1.2	Total asset dan Total penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2008 – Q2021	9
Tabel 1.3	Tabel Inflasi, Nilai tukar dan jumlah uang yang beredar....	10
Tabel 3.1	Bank Umum Syariah	58
Tabel 3.2	Bank Umum Syariah Sampel	60
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel	61
Tabel 4.1	Komposisi Pembiayaan BUS Triwulan 1 2020 - Triwulan 1 2021	73
Tabel 4.2	Capital Adequacy Ratio Triwulan 1 2020 - Triwulan 1 2021	75
Tabel 4.3	Non Performing Financing Triwulan 1 2020 - Triwulan 1 2021	77
Tabel 4.4	Return On Assets Triwulan 1 2020 - Triwulan 1 2021	79
Tabel 4.5	Financing to Deposit Ratio Triwulan 1 2020 - Triwulan 1 2021	81
Tabel 4.6	Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Triwulan 1 2020 - Triwulan 1 2021	82
Tabel 4.7	Statistik Deskriptif	89
Tabel 4.8	Statistik Frekuensi Branchless Banking	93
Tabel 4.9	Uji Normalitas	97
Tabel 4.10	Uji Multikolinieritas	98
Tabel 4.11	Uji Autokolerasi	100
Tabel 4.12	Analisis Regresi Linier Berganda	101
Tabel 4.13	Hasil perhitungan uji t	104
Tabel 4.14	Hasil perhitungan uji f	108
Tabel 4.15	Koefisien Determinasi	109
Tabel 4.16	Ringkasan Hasil Regresi	109

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Inflasi Triwulan 1 2020 - Triwulan 1 2021.....	84
Grafik 4.2	Nilai Tukar Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021.....	85
Grafik 4.3	Jumlah uang yang beredar Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021.....	87
Grafik 4.4	Grafik Histogram	95
Grafik 4.5	Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual ...	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 atau lebih familiar kita menyebutnya COVID-19 adalah virus menular yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Mata rantai sebaran virus ini telah menular ke berbagai belahan dunia dengan sangat cepat, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan status COVID-19 sebagai pandemi. Berdasarkan data WHO per 28 April 2021, kasus terkonfirmasi COVID di dunia sebanyak 148.329.348 kasus dengan terkonfirmasi meninggal dunia sebanyak 3.128.962 kasus (WHO.int). Indonesia merupakan satu di antara negara yang terkena dampak pandemi Covid 19. Data statistik per 28 April 2021, menunjukkan kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.657.035 kasus dengan terkonfirmasi meninggal dunia sebanyak 45.116 kasus (covid19.go.id). Penyebaran Covid 19 berdampak pada segala aspek kehidupan, tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga berdampak pada semua sektor yang diprediksi akan berlangsung lama (Djalante et al., 2020).

Salah satu sektor yang terdampak yaitu sektor ekonomi. Dari sektor ekonomi, sistem perbankan di Indonesia adalah salah satu yang terdampak, termasuk perbankan syariah. Dampak yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dampak yang dihadapi oleh perbankan

saat ini diantaranya resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional. Krisis pada sektor perbankan kian bertambah, oleh karena itu suplai dana tunai yang tersedia di perbankan akan menurun. Sementara itu, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan penurunan pendanaan pada bank konvensional maupun bank syariah (Hanoatubun Silpa, 2020).

Secara umum, ada beberapa resiko yang pasti dihadapi bank. Pertama, penurunan likuiditas bank, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo. Kedua, kenaikan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF), di mana bank syariah mengalami pelambatan penyaluran kredit. Ketiga, penurunan kualitas aset, bank syariah memerlukan bantuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Keempat, pengetatan margin bunga bersih.

Untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi, Pemerintah mengeluarkan regulasi perbankan untuk memberikan stimulus ekonomi. Regulasi perbankan secara umum dianggap perlu untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan dan penanggulangan berbagai dampak negatif yang muncul pada saat terjadi guncangan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan mampu berjalan secara efektif untuk ikut andil mendorong kinerja perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian

Wahyudi (2017) dan Wahyudi, Mujibatun, Riduwan (2019) yang menyimpulkan bahwa paket kebijakan berkontribusi signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independent yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor keuangan mengeluarkan sebuah kebijakan *countercyclical* yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dengan adanya peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak pandemi virus corona akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit. Relaksasi kredit tersebut diharapkan memberikan dampak stimulus yang baik terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah.

Dalam menganalisa efektivitas atau dampak regulasi terhadap kinerja perbankan, bisa diukur dari sisi pembiayaan bank. Karena apabila pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan perekonomian. Untuk menganalisa efektivitas kinerja bank dari sisi pembiayaan, setidaknya ada dua studi yang dilakukan. Pertama terkait peran atau dampak langsung regulasi perbankan terhadap kinerja bank (Barth et al., 2001), dan yang kedua berkaitan dengan peran tidak langsung atau dampak variabel seperti faktor fundamental bank lain dan variabel makroekonomi terhadap kinerja bank (Kasri et al., 2017).

Variabel yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan bank syariah yaitu Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), Laba atas Aset (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR), Nilai Tukar, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar. Variabel yang dipengaruhi secara langsung oleh regulasi perbankan, yaitu Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF). Variabel faktor fundamental bank lain adalah Laba atas Aset (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR). Sedangkan variabel makroekonomi adalah Nilai Tukar, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar.

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya resiko. Rasio Kecukupan Modal (CAR) adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan modal, surat berharga dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Ketika terjadi peningkatan pertumbuhan pembiayaan akan mengakibatkan naiknya ATMR yang kemudian berimplikasi pada penurunan CAR. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Dyah dan Rahmatina (2019); Yoel (2016) menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan

oleh Bakti, (2018); Sudarsono (2017) menemukan bahwa Rasio Kecukupan Modal (CAR) dapat berpengaruh positif terhadap pembiayaan bank syariah.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi yaitu menyalurkan pembiayaan, bank harus memperhatikan kecukupan modal yang dimilikinya, sehingga bank tidak secara sembarangan melakukan ekspansi pinjaman hanya untuk memperoleh laba yang besar, juga agar tidak terlalu membatasi pinjaman hanya untuk menghindari risiko kredit macet yang ditunjukkan rasio Non Performing Financing (NPF). Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio NPF yang tinggi akan menurunkan tingkat pembiayaan, hal ini disebabkan karena ketika terjadi banyak pembiayaan bermasalah, bank perlu berhati – hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin sedikit pendapatan bank diakibatkan banyak pembiayaan yang bermasalah sehingga berdampak pada pembiayaan yang menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Dyah dan Rahmatina (2019); dan Bakti (2018) menemukan bahwa NPF memberikan dampak negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan menurut penelitian Whidaningayu (2015) NPF dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembiayaan syariah.

Laba atas Aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan yang kemudian akan meningkatkan pembiayaan. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Umiyati et al., (2017); Nur Dyah dan Rahmatina (2019) menemukan bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan.

Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR) merupakan seberapa besar kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah seluruh dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. Nilai FDR dinilai efektif untuk mendukung perolehan imbal hasil tinggi jika berada kisaran 85% - 100%. Semakin efektif nilai FDR maka akan semakin banyak dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati et al., (2017); Nur Dyah dan Rahmatina (2019) menemukan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan.

Tingkat efisiensi kinerja operasional juga merupakan faktor yang penting. Tingkat efisiensi suatu bank tercermin dari nilai Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar yang akan meningkatkan pembiayaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masudah, (2017); Nur Dyah dan Rahmatina (2019) menemukan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kapasitas debitur serta mengurangi resiko kredit perbankan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Laporan Statistik

Perbankan Syariah, berikut data ROA, CAR, NPF, FDR dan BOPO pada Bank Umum Syariah Tahun 2018 – Maret 2021.

Tabel 1.1
Data ROA, CAR, NPF, FDR dan BOPO Bank Umum Syariah
Tahun 2018 – Q1 2021
dalam persen (%)

Periode	ROA	CAR	NPF	FDR	BOPO
2018	1,28	20,39	3,26	78,53	89,18
2019	1,73	20,59	3,23	77,91	84,45
Q12020	1,86	20,36	3,43	78,93	83,04
Q22020	1,40	21,20	3,34	79,37	86,11
Q32020	1,36	20,41	3,28	77,06	86,12
Q42020	1,40	21,64	3,13	76,36	85,55
Q12021	2,06	24,45	3,23	77,81	82,10

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio keuangan ROA, CAR, NPF, FDR dan BOPO pada periode 2018 sampai dengan triwulan 1 tahun 2021 mengalami fluktuasi. Nilai ROA terendah pada tahun 2018 sebesar 1,28% dan tertinggi pada periode triwulan 1 tahun 2021 sebesar 2,06%. Nilai CAR terendah pada periode triwulan 1 tahun 2020 sebesar 20,36% sedangkan tertinggi pada periode triwulan 1 tahun 2021 sebesar 24,45%. Nilai NPF terendah pada periode triwulan 4 tahun 2020 sebesar 3,13% sedangkan tertinggi pada periode triwulan 1 tahun 2020 sebesar 3,43. Nilai FDR terendah pada pada periode triwulan 4 tahun 2020 sebesar 76,36%

sedangkan tertinggi pada periode triwulan 2 tahun 2020 sebesar 79,37%. Nilai BOPO terendah pada periode triwulan 1 tahun 2021 sebesar 82,10% sedangkan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 89,18%.

Pada awal pandemi covid 19 yaitu pada periode triwulan 1 tahun 2020, nilai ROA, NPF dan FDR mengalami kenaikan sedangkan CAR dan BOPO mengalami penurunan. Nilai ROA, CAR, NPF, FDR dan BOPO selama periode covid 19 dari triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 1 2021 mengalami fluktuasi. ROA terendah terjadi pada triwulan 3 2020 sebesar 1,36 % sedangkan nilai tertinggi pada triwulan 1 2021 sebesar 2,06 %. CAR terendah terjadi pada triwulan 1 2020 sebesar 20,36 % dan nilai tertinggi terjadi pada triwulan 1 2021 sebesar 24,45 %. NPF terendah terjadi pada triwulan 3 2020 sebesar 3,13 % dan nilai tertinggi pada triwulan 1 2020 sebesar 3,43 %. FDR terendah terjadi pada triwulan 4 2020 sebesar 76,36 % dan nilai tertinggi pada triwulan 2 2020 sebesar 79,37 %. BOPO terendah pada triwulan 1 2021 sebesar 82,10 % dan nilai tertinggi pada triwulan 3 2020 sebesar 86,12 %.

Tabel 1.2
Total aset dan Total Penyaluran Pembiayaan
Bank Umum Syariah
Tahun 2018 – Q1 2021
Dalam milyar rupiah

Periode	Total Aset	Total Penyaluran Pembiayaan
2018	316.691	118.541
2019	350.364	225.607
Q12020	349.950	228.394
Q22020	356.330	232.859
Q32020	375.157	240.508
Q42020	397.073	246.532
Q12021	393.168	248.181

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Total Aset dan Pembiayaan pada periode 2018 sampai dengan triwulan 1 tahun 2021 mengalami fluktuasi. Nilai Total Aset terendah pada tahun 2018 sebesar 316.691 milyar rupiah dan tertinggi pada periode triwulan 4 tahun 2020 sebesar 397.073 milyar rupiah. Total penyaluran pembiayaan terendah pada tahun 2018 sebesar 118.541 milyar rupiah sedangkan tertinggi pada periode triwulan 1 tahun 2021 sebesar 248.181 milyar rupiah.

Pada awal pandemi covid 19 yaitu pada periode triwulan 1 tahun 2020, total aset mengalami penurunan sedangkan jumlah total penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan. Jumlah total aset dan pembiayaan selama periode covid 19 dari triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 1 2021 mengalami fluktuasi. Pembiayaan mengalami kenaikan selama periode

triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 1 2021. Pembiayaan terendah pada triwulan 1 2020 sebesar 228.394 milyar rupiah sedangkan tertinggi pada triwulan 1 tahun 2021 sebesar 248.181 milar rupiah. Total aset mengalami fluktuasi cenderung naik, dengan nilai terendah pada triwulan 1 2020 sebesar 349.950 milyar rupiah dan tertinggi pada triwulan 4 2020 sebesar 397.073 milyar rupiah.

Sementara dari sisi eksternal, pertumbuhan bank syariah dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti inflasi, nilai tukar dan jumlah uang beredar. Kondisi makroekonomi ini tentu berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank yaitu pembiayaan.

Tabel 1.3
Tabel Inflasi, Nilai Tukar dan Jumlah uang beredar
Tahun 2018 – Q1 2021

Periode	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp)	Jumlah uang beredar (milyar Rp)
2018	3,13	14.481	5.760.046,20
2019	2,72	13.901	6.136.551,81
Q1 2020	2,96	16.367	6.440.457,39
Q2 2020	1,96	14.302	6.393.743,80
Q3 2020	1,42	14.918	6.748.574,03
Q4 2020	1,68	14.105	6.900.049,49
Q1 2021	1,37	14.572	6.888.026,54

Sumber : Bank Indonesia, data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2018 sampai dengan triwulan1 tahun 2021, inflasi mengalami penurunan

yang signifikan. Nilai inflasi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 3,13% sedangkan terendah pada periode triwulan 1 tahun 2021 sebesar 1,37%. Nilai tukar mengalami fluktuasi dengan nilai terendah pada tahun 2019 sebesar 13.901 rupiah dan nilai tertinggi pada periode triwulan 1 tahun 2020 sebesar 16.367 rupiah. Jumlah uang yang beredar nilai terendah pada tahun 2018 sebesar 5.760.046,20 milyar rupiah dan nilai tertinggi pada periode triwulan 4 tahun 2020 sebesar 6.900.049,49 milyar rupiah.

Pada awal pandemi covid 19 yaitu pada periode triwulan 1 tahun 2020, inflasi, nilai tukar dan jumlah uang yang beredar mengalami kenaikan. Nilai inflasi, nilai tukar dan jumlah uang yang beredar selama periode covid 19 dari triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 1 2021 mengalami fluktuasi. Inflasi mengalami penurunan dengan nilai tertinggi terjadi pada triwulan 1 2020 sebesar 2,96 % sedangkan terendah pada triwulan 1 2021 sebesar 1,37 %. Nilai tukar terendah terjadi pada triwulan 4 2020 sebesar 14.105 rupiah dan tertinggi pada triwulan 1 2020 sebesar 16.367 rupiah. Jumlah uang beredar terendah terjadi pada triwulan 2 2020 sebesar 6.393.743,80 milyar rupiah sedangkan tertinggi pada triwulan 4 2020 sebesar 6.888.026,54 milyar rupiah.

Inflasi, nilai tukar dan jumlah uang yang beredar secara umum sangat dimungkinkan akan berpengaruh pada kemampuan nasabah untuk meningkatkan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah yang kemudian akan berpengaruh pada fungsi intermediasi yaitu pembiayaan. Pada kondisi inflasi tinggi, maka menyebabkan harga barang menjadi naik, kemudian terjadi peningkatan nilai tukar yang menyebabkan masyarakat enggan

menabung. Harga barang naik menyebabkan daya beli masyarakat menurun atau kemampuan masyarakat untuk membeli barang melalui pembiayaan, hal ini menyebabkan permintaan terhadap pembiayaan meningkat. Bertambahnya Jumlah uang yang beredar memberi peluang bagi perbankan untuk melakukan fungsi intermediasi. Peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat direspon perbankan syariah dengan peningkatan pembiayaan. Sebab, kenaikan jumlah uang beredar akan meningkatkan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, yang kemudian disalurkan oleh bank syariah melalui pembiayaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifai et al., (2017) bahwa variabel makroekonomi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pembiayaan syariah. Dimana nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah, sedangkan inflasi dan jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan syariah. Berdasarkan penelitian dari Nur Dyah dan Rahmatina (2019) menemukan bahwa Inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan, sedangkan jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan.

Setelah kebijakan stimulus, rasio keuangan mengalami fluktuasi dan terjadi peningkatan total aset dan total pembiayaan, meskipun pembiayaan mengalami penurunan di triwulan 4 tahun 2021. Berdasarkan data statistik tersebut, apakah hasil Peningkatan Total Aset dan Total Pembiayaan merupakan dampak dari regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah di Indonesia? Dengan perspektif tersebut,

penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui peran regulasi atau kebijakan stimulus yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 dalam mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Dampak dari pandemi covid ini juga berpengaruh pada manajemen strategi Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Namun disisi lain, ancaman terhadap paparan virus covid-19 menjadi tantangan bagi lembaga perbankan. Berbagai kebijakanpun dikeluarkan diantaranya pembatasan layanan melalui tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dengan memanfaatkan aplikasi digital.

Untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah dalam masa pandemi covid-19, diperlukan inovasi. Salah satunya dengan cara meningkatkan layanan keuangan digital. Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan tentang branchless banking berupa POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Dalam regulasi ini, layanan perbankan disinergikan dengan layanan keuangan digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam kondisi pandemi covid-19 ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan dan mengoptimalkan layanan keuangan digital ini tanpa harus datang ke bank untuk mendapatkan layanan keuangan secara langsung. Sistem Branchless banking adalah sistem kantor tanpa cabang, dimana sistem

ini akan mengurangi biaya operasional, peningkatan pangsa pasar, dapat menjangkau segmen pelanggan yang lebih luas serta efektivitas biaya. Sehingga dengan meningkatnya pangsa pasar akan meningkatkan pembiayaan. Menurut penelitian Nur Dyah, Rahmatina (2019), penerapan Branchless banking mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menjelaskan bahwa branchless banking merupakan strategi yang ditujukan untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat tanpa harus bergantung pada jaringan cabang fisik atau outsourcing pemrosesan transaksi layanan perbankan kepada pihak ketiga (Sarah, 2011). Berdasarkan perspektif tersebut apakah layanan keuangan digital sudah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dalam masa pandemi covid-19? Sehingga perlu diteliti dampak dari peraturan tersebut dalam meningkatkan layanan perbankan di masa pandemi covid-19 ini.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan termasuk perbankan syariah dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran covid-

19. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui POJK No.11/POJK.03/2020 diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kinerja perbankan di Indonesia.

Dampak dari pandemi covid-19, perbankan dituntut untuk tetap memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mematuhi prosedur penanggulangan covid, seperti physical distancing, mengurangi layanan tatap muka dan sebagai gantinya perbankan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi. Salah satu regulasi yang mendukung penerapan pemanfaatan layanan keuangan digital adalah POJK Nomor 19/POJK.03/2014. Dengan diterapkannya regulasi ini secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini menguji pengaruh peran regulasi atau kebijakan stimulus yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 dalam mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dan peran Nomor 19/POJK.03/2014 dalam pengoptimalan layanan keuangan digital melalui kinerja perbankan. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, Nilai Tukar, Jumlah uang beredar, Branchless Banking mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kebijakan stimulus POJK No.11/POJK.03/2020 dalam mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dan peran POJK Nomor 19/POJK.03/2014 mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia melalui kinerja perbankan yang dapat dilihat dari pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi , Nilai Tukar , Jumlah uang beredar , Branchless Banking terhadap pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademisi dan pembuat kebijakan, terutama mengenai efektivitas peraturan perbankan dalam memberikan stimulus ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid-19 terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Dampak langsung regulasi terhadap kinerja bank

Regulasi perbankan dianggap perlu bagi suatu negara untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan dan penanggulangannya sebagai dampak negatif yang dapat muncul pada saat terjadi guncangan ekonomi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kinerja perbankan sangat dipengaruhi oleh peraturan perbankan (Bart et al., 1997; Barth et al., 2001; Naceur dan Omran, 2011). Hal ini dikarenakan mengingat sistem perbankan dan keuangan yang berfungsi dengan baik, mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan mengalokasikan dana untuk lebih produktif dalam investasi.

Untuk menilai efektifitas atau dampak langsung regulasi terhadap kinerja bank (Barth et al., 2001) variabel yang dipengaruhi secara langsung oleh regulasi perbankan adalah Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF). Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) adalah variabel yang paling penting dan paling tinggi aspek yang diatur dalam perbankan karena mencerminkan resiko dalam sektor perbankan.

2.1.1.1 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi, dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat mempengaruhi besarnya modal bank (Ariyani, 2010). Menurut Hasibuan (2008:58), CAR adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank dalam mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko (Fahmi, 2015: 38).

Menurut Sudirman (2013: 83), dengan CAR tertentu menjamin adanya imbang antara jumlah dana yang dihimpun oleh bank dengan modal bank yang ada dan menguntungkan serta bank mampu mengatasi risiko. CAR minimum yang harus dimiliki oleh bank ditentukan oleh otoritas, yaitu bank sentral dan untuk menentukan CAR sebuah bank dihitung dari modal bank di banding dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR bank.

CAR merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan bank, untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan. Penilaian permodalan

merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover risiko saat ini dan mengantisipasi risiko dimasa mendatang. CAR menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008, nilai CAR minimal adalah 8%. Bank yang dianggap sehat adalah bank yang memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) di atas 8%, sehingga semakin tinggi CAR mengindikasikan semakin baik tingkat kesehatan bank.

Menurut Daris Purba (2011), Rasio CAR merupakan alat pengukur kinerja keuangan bank yang menggambarkan kondisi perbankan di antaranya :

1. Indikasi permodalan apakah telah memadai (adequate) untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif karena setiap kerugian akan mengurangi

modal. CAR mengukur kemampuan permodalan bank dalam mengantisipasi penurunan aktiva dan menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam pembiayaan. CAR yang tidak mencerminkan semakin baiknya permodalan karena modal dapat digunakan untuk menjamin pemberian pembiayaan. CAR yang rendah mencerminkan bahwa permodalan bank kurang baik karena bank kurang mampu menutup kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pembiayaan.

2. Kemampuan membiayai operasional dan membiayai seluruh aktiva tetap dan investasi bank. CAR yang tinggi menunjukkan cukupnya modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat melakukan pengembangan bisnis serta ekspansi usaha dengan lebih aman.
3. Kemampuan bank dalam meningkatkan rentabilitas. CAR yang tinggi menunjukkan bank tersebut memiliki tingkat modal yang cukup besar dalam meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas pembiayaannya, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar bagi bank untuk meningkatkan rentabilitasnya.
4. Ketahanan dan efisiensi perbankan. Bila CAR rendah, kemampuan bank untuk survive pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri cepat habis untuk menutupi kerugian yang dialami dan akhirnya kelangsungan usaha bank menjadi terganggu.

2.1.1.2 Non Performing Financing (NPF)

Bank dalam menjalankan operasinya tentunya tak lepas dari berbagai macam risiko. Risiko usaha bank merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima (Permono,2000). Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Menurut Ali (2006), risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Bank dikatakan mempunyai NPF yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPF suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Wuri, 2011). Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah

(yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah. 2012).

Menurut Darmawi (2014: 126) Non Performing Financing (NPF) meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi.

Besarnya NPF merupakan indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2017, rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank (Popita, 2013). Non Performing Financing (NPF) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank (Dayinta, 2011).

2.1.2. Faktor Fundamental Bank Lain terhadap kinerja bank

Untuk meneliti efektivitas atau dampak regulasi terhadap kinerja perbankan, selain variabel yang berdampak secara langsung diperlukan juga variabel tidak langsung yaitu faktor fundamental bank lain, seperti Return on Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) (Kasri et al., 2017).

2.1.2.1 Return On Assets (ROA)

Analisis rasio profitabilitas menurut Dendawijaya (2009:118) adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Sofyan, 2002). Menurut Karya dan Rakhman, tingkat Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009: 118). Semakin tinggi ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam

memanfaatkan aset yang menghasilkan laba bersih setelah pajak. Semakin tinggi ROA semakin tinggi profitabilitas suatu bank dan ketika profitabilitas bank tinggi maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Simorangkir, 2004).

2.1.2.2 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing To Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas yang mewakili kedua aktivitas utama bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan (pembiayaan). Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2015: 319).

Menurut Dendawijaya (2005:116) FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber

likuiditasnya. FDR dihitung dari perbandingan antara total kredit dengan dana pihak ketiga.

FDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.

Rasio FDR merupakan salah satu indikator likuiditas yang menentukan apakah bank dikatakan likuid atau tidak yang mana rasio FDR minimal harus di angka 75% dan maksimal di angka 110%. Namun tingkat FDR bank harus dijaga agar selalu berada dalam batas normal yaitu antara 85%-100%. Pentingnya menjaga nilai FDR dalam batas normal dikarenakan FDR mencerminkan kelikuidan dari suatu bank. Jika FDR berada jauh di bawah batas normal, artinya bank memelihara kas terlalu banyak, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan biaya pemeliharaan kas dan

mengurangi laba. Jika FDR berada jauh di atas batas normal berarti bank harus mengeluarkan biaya yang semakin besar terkait dengan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Dimana semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK), yang kemudian biaya tersebut akan menjadi beban operasional bank sehingga mengurangi perolehan laba bank serta mempertinggi resiko pembiayaan bermasalah (NPF).

2.1.2.3 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya terutama kredit, dimana bunga kredit menjadi pendapatan terbesar perbankan. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.

Menurut ketentuan Bank Indonesia, BOPO merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar (sesuai dengan harapan pihak manajemen dan pemegang saham) serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna (Mawardi, 2005).

Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Hariyani,2010:54). BOPO juga merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional. Resiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa – jasa dan produk – produk yang ditawarkan. Menurut Joliana (2013:32) semakin besar rasio BOPO menunjukkan bank yang kurang efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Sedangkan semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. BOPO yang besar mengandung arti biaya operasional yang ditanggung lebih besar daripada pendapatan operasional sehingga kemungkinan modal digunakan untuk menutupi biaya operasional tersebut. Semakin rendah BOPO semakin kecil biaya operasional, yang akhirnya pendapatan bank mengalami kenaikan.

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

2.1.3. Kebijakan Makroprudensial terhadap kinerja bank

Dampak tidak langsung yang digunakan untuk mengukur efektivitas regulasi terhadap kinerja perbankan, selain faktor fundamental bank adalah variabel makro ekonomi (Kasri et al., 2017).

Perkembangan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, nilai tukar, dan inflasi akan mencerminkan stabilitas perekonomian yang dapat memengaruhi kinerja sektor keuangan suatu negara. Variabel makroekonomi yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan bank syariah yaitu inflasi, nilai tukar dan jumlah uang yang beredar. Kondisi makroekonomi ini tentu berpengaruh terhadap fungsi mediasi bank yaitu pembiayaan.

2.1.3.1 Inflasi

Inflasi adalah salah satu sumber ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dimana terjadi kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Dalam literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Menurut Rahardja dan Mandala Manurung (2004; 155) mengatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang – barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus menerus. Sementara menurut Sukirno (2002; 33) inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan pasar bertambah besar dibandingkan dengan penawaran barang pasar. Inflasi merupakan

gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan (Hasyim, 2016:186).

Dalam perbankan, khususnya dalam kegiatan penghimpunan dana, naik turunnya inflasi akan mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun oleh masyarakat. Karena dampak buruk dari inflasi bagi sektor perbankan yaitu pemilik modal akan mengalihkan uang yang ia miliki untuk tujuan spekulasi, seperti membeli tanah, rumah dan lain – lain, sehingga investasi produktif akan berkurang yang berakibat pada menurunnya kegiatan ekonomi (Hasyi, 2016 : 186).

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana meningkatnya harga barang-barang secara umum yang merupakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat secara terus menerus. Inflasi dapat disimpulkan jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa. Kenaikan harga barang akan berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat yang kemudian menimbulkan penurunan nilai uang yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk menabung karena nilai mata uang yang ditabung semakin menurun yang berakibat pada menurunnya dana pihak ketiga.

Menurut Pratama Rahardja dan Manurung (2004) sebagaimana dikutip oleh Nur Rianto Arif (2010; 92-93), Inflasi memiliki dampak buruk terhadap individu dan masyarakat, seperti

menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, memperburuk distribusi pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi.

Selain dampak tersebut, Inflasi juga mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan return perusahaan. Penurunan return yang terjadi akan memengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Semakin tinggi inflasi maka kegiatan penghimpunan dana pada bank sedikit banyak akan berpengaruh. Hasil penelitian Yanti (2012), Badar et al. (2013) serta Radivojevic dan Jovovic (2017) menyatakan inflasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai kredit atau pembiayaan bermasalah.

2.1.3.2 Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang merupakan perbandingan nilai dua mata uang yang berbeda atau dikenal dengan sebutan kurs. Kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Menurut Todaro (2000:247) kurs adalah suatu tingkat, tarif, harga dimana Bank Sentral bersedia menukar mata uang dari suatu negara dengan mata uang dari negara-negara lain. Kurs merupakan harga dari mata uang luar negeri. Kurs rupiah terhadap dollar AS memainkan

peranan sentral dalam perdagangan internasional, karena kurs rupiah terhadap dollar AS memungkinkan kita untuk membandingkan semua harga barang dan jasa yang dihasilkan berbagai negara (Triyono, 2008).

Menurut Halwani (2005;157), nilai tukar didasari 2 konsep, yaitu : pertama, konsep nominal, merupakan konsep untuk mengukur perbedaan harga mata uang yang menyatakan berapa jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan guna memperoleh sejumlah mata uang dari negara lain. Kedua, konsep riil yang dipergunakan untuk mengukur daya saing komoditi ekspor suatu negara di pasaran internasional.

Menurut Kuncoro (2008), kurs rupiah adalah nilai tular sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US\$ (US Dolar). Nilai tukar tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Jika harga rupiah terhadap dollar melemah, maka permintaan terhadap mata uang dollar akan meningkat. Hal ini disebabkan karena investor cenderung akan melepas rupiah dan akan membeli dollar.

Nilai tukar atau kurs valuta asing didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Sukirno, 2004). Menurut pendapat Lipsey et. al. (1992, h. 484) nilai tukar atau exchange rate juga dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara yang

dinyatakan dalam mata uang lain, atau klaim atas mata uang tersebut, dapat dibeli dan dijual. Nilai tukar uang mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi. Pergolakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mempunyai dampak yang cukup besar bagi kegiatan perekonomian Indonesia di pasar dunia.

Menurut dasar pikiran ekonomi Keynes dalam buku ekonomi moneter (Nopirin, 1987:173), faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kurs valuta asing yaitu pendapatan, harga, dan tingkat bunga. Makin tinggi tingkat pertumbuhan, makin besar kemungkinan untuk impor yang berarti makin besar pula permintaan akan valuta asing. Jika kurs valuta asing cenderung naik, maka nilai mata uang domestik akan turun.

Kaminsky dan Reinhart (1999) menyatakan bahwa depresiasi (penurunan) tak terduga nilai tukar mata uang domestik mengancam profitabilitas bank dan kinerja NPL.

2.1.3.3 Jumlah uang yang beredar

Uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi (Mankiw, 2006:76). Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Pengertian

uang yang beredar dibedakan menjadi dua, yaitu uang yang beredar dalam arti sempit (M1) merupakan uang yang sangat likuid (biaya mempergunakannya sangat rendah), yang termasuk dalam golongan ini adalah uang kartal (uang yang dicetak pemerintah) ditambah dengan uang giral (simpanan masyarakat pada bank umum) dan uang yang beredar dalam arti luas (M2) meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening/tabungan valas milik swasta domestik (Sukirno, 2004:281).

Jumlah uang yang tersedia disebut jumlah uang beredar (money supply), dalam perekonomian yang menggunakan uang komoditas, jumlah uang beredar adalah jumlah dari komoditas itu dan pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar (Mankiw, 2006:79). Menurut Nopirin (1992:170) jumlah uang yang beredar ditentukan oleh Bank Sentral, namun kenyataannya jumlah uang yang beredar merupakan hasil perilaku dari Bank Sentral, Bank Umum (termasuk lembaga keuangan bukan bank) dan masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yaitu :

- Pendapatan ; Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, bila pendapatan masyarakat rendah, maka semakin kecil pula jumlah uang yang beredar di masyarakat.

- Tingkat suku bunga; Bila suku bunga rendah maka orang cenderung enggan menabung di bank jumlah uang beredarpun akan meningkat. Sebaliknya, bila suku bunga bank tinggi, banyak orang yang tertarik untuk menyimpan uang di bank, efeknya jumlah uang yang beredar juga akan berkurang.
- Harga Barang; Pada saat harga barang naik, maka peredaran uang akan semakin cepat karena dibutuhkan banyak uang untuk membeli barang tersebut.
- Fasilitas Kredit; Jika masyarakat suka akan penggunaan kredit, maka dengan sendirinya penggunaan uang tunai akan berkurang. Begitu juga sebaliknya.

Menurut Mishkin, (2008:130) Semakin tinggi uang beredar domestik akan menyebabkan mata uang domestik terdepresiasi. Jika jumlah uang yang beredar terlalu besar maka masyarakat akan lebih banyak menggunakannya untuk proses transaksi sehingga menyebabkan kenaikan harga barang di dalam negeri. Apabila harga yang tinggi di dalam negeri dibanding luar negeri maka masyarakat domestik lebih membeli barang dari luar negeri, sehingga menyebabkan mata uang rupiah akan melemah atau terdepresiasi.

Jumlah uang beredar bukanlah satu-satunya faktor penentu kenaikan tingkat harga. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga, seperti pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan pajak, juga

besarnya impor barang yang membanjiri pasar domestik. Keynes menganggap bahwa inflasi juga merupakan fenomena ekonomi di bidang moneter, namun perubahannya yang bersifat antisipatif pada jumlah uang beredar akan memberikan pengaruh terhadap tingkat harga dan tidak terhadap tingkat output.

Meningkatnya jumlah uang beredar secara terus menerus akan menyebabkan terjadinya inflasi. Jika jumlah uang beredar terus tumbuh, perekonomian akan terus bergerak pada tingkat harga yang lebih tinggi. Selama jumlah uang yang beredar meningkat dalam proses terus menerus, inflasi akan timbul. Dengan kata lain, peningkatan tingkat harga lebih disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar. Semakin besar jumlah uang yang beredar maka mengakibatkan inflasi juga membesar.

2.1.4. Branchless Banking / Laku Pandai

Dampak dari pandemi covid ini berpengaruh pada manajemen strategi Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Salah satu inovasi yang dapat meningkatkan kinerja perbankan dalam masa pandemi ini adalah Branchless Banking. Branchless Banking merupakan salah satu program guna mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014. Menurut Otoritas Jasa Keuangan Laku Pandai (layanan

keuangan tanpa kantor) adalah penyediaan layanan perbankan / layanan keuangan melalui kerja sama pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Branchless Banking seperti yang dijelaskan dalam preliminary study Bank Indonesia (2011) merupakan konsep penyediaan layanan perbankan di luar bentuk konvensional bank pada umumnya baik dengan menggunakan layanan teknologi informasi dan teknologi komunikasi (Information, communication and technology/ITC) maupun melalui keterlibatan pihak ketiga (business correspondents).

Sedangkan menurut Carmel dan Scott (dalam Purwati et al, 2014), branchless banking sebagai bentuk pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat di luar cabang bank yang tradisional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Menurut Sarah (2011) Branchless banking merupakan strategi yang ditujukan untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat tanpa harus bergantung pada jaringan cabang fisik atau outsourcing pemrosesan transaksi layanan perbankan kepada pihak ketiga.

Branchless Banking merupakan bagian dari program Inklusi Keuangan yang menyediakan jasa keuangan yang dilakukan diluar cabang menggunakan teknologi dan komunikasi serta agen ritel non- bank. Keuangan inklusif adalah keadaan di mana semua orang dewasa di usia kerja memiliki akses yang efektif untuk kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal seperti perbankan. Beberapa layanan

Branchless Banking yang paling umum yaitu mobile Banking, internet Banking, electronic money, mobile money, dan lain-lain. Dengan diaplikasikannya program Laku Pandai jangkauan aktivitas layanan perbankan dapat dilakukan lebih luas tanpa melalui kantor fisik bank, sehingga mempengaruhi biaya dan dana milik nasabah yang terhimpun di bank yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan perbankan.

Program Laku Pandai ini akan memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal atau menggunakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya melalui kemudahan layanan keuangan syariah dimana saja, tanpa harus terikat dengan kantor cabang bank. Hal ini bisa menjadi sebuah strategi perbankan dalam masa pandemi dimana pemerintah menerapkan kebijakan terkait penanggulangan dampak covid seperti jumlah minimum karyawan yang bekerja di kantor, physical distancing, pembatasan layanan melalui tatap muka langsung dan sebagai gantinya dapat memaksimalkan penggunaan teknologi.

Dalam masa pandemi ini, melalui Branchless Banking diharapkan perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan baik dengan tetap meningkatkan akses masyarakat ke layanan jasa keuangan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga stabilitas sistem keuangan .

2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya

2.2.1 Dampak Langsung Regulasi Terhadap Kinerja Bank

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel yang dipengaruhi secara langsung oleh regulasi adalah Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF). Karena kedua variabel ini mencerminkan risiko sektor perbankan.

Zang dkk. (2008) meneliti pelaksanaan regulasi yang mengatur tentang kecukupan modal bank komersial di Cina dan menyimpulkan bahwa meningkatkan CAR efektif dalam mengurangi risiko portofolio. Di Lebanon, korelasi positif ditemukan antara profitabilitas bank dan peningkatan modal (Awdeh et al., 2011), sedangkan Lotto (2016) menunjukkan bahwa modal Persyaratan di Tanzania dianggap penting dan dipandang sebagai batu loncatan menuju stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan juga dikatakan berpotensi terganggu oleh kegiatan non perbankan apabila terdapat hubungan antara kegiatan perbankan atau kegiatan keuangan sektor lainnya. Di Indonesia, hasil penelitian dari Sari (2013) selama periode 2008 – 2012 adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), CAR, NPL dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Bakti (2018) menyimpulkan bahwa pembiayaan bank syariah selama periode 2010 – 2015 adalah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh DPK dan CAR, tetapi dampak ROA dan NPF tidak signifikan.

Sudarsono (2017) meneliti periode 2010 – 2015 menemukan bahwa DPK, CAR, FDR dan Profit Sharing Rate (TBH) berhubungan positif

dengan pembiayaan, sedangkan BOPO berhubungan negatif dengan pembiayaan. Menurut Whidaningayu (2015) NPF dan DPK berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan syariah di Indonesia. Sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan syariah.

Selain itu penelitian Nur Dyah; Rahmatinah (2019) tentang peran regulasi perbankan dalam pemerataan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa regulasi stimulus berpengaruh positif terhadap total distribusi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Ini terbukti dari dampak kebutuhan modal (CAR), pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM (PYDUMKM), kualitas kolektibilitas (PFNPF) dan investasi bank (penyertaan modal) dipengaruhi oleh regulasi.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap total jumlah pembiayaan yang disediakan selama periode stimulus. Selain itu ditemukan juga adanya hubungan yang positif antara pembiayaan kepada UMKM dengan total pembiayaan yang diberikan. Juga ditemukan hubungan positif yang signifikan antara DPFNPF dan PYD, yaitu peningkatan variabel migrasi NPF ke PF disertai dengan peningkatan yang signifikan total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Demikian pula hubungan positif yang signifikan antara INV BANK dan PYD, yaitu terjadi peningkatan variabel penyertaan modal menyebabkan peningkatan total pembiayaan yang didistribusikan oleh bank syariah.

2.2.2 Faktor Fundamental Bank Lain terhadap kinerja bank

Secara umum, penelitian yang dilakukan terhadap bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa faktor fundamental seperti ROA dan FDR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penyaluran dana syariah (Umiyati et al., 2017), sedangkan rasio efisiensi operasional (BOPO) memiliki efek sebaliknya (Masudah, 2017). Hasil penelitian Umiyati et al., 2017 menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dipengaruhi oleh DPK, FDR, ROA, NPF dan Inflasi dimana ROA dan FDR berpengaruh positif terhadap penyaluran dana syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masudah, 2017 selama periode 2011-2015 menemukan bahwa DPK dan nilai tukar memiliki dampak positif pada pembiayaan yang diberikan, rasio efisiensi operasional (BOPO) dan suku bunga memiliki dampak negatif pada volume pembiayaan bank syariah sedangkan NPF dan inflasi tidak signifikan mempengaruhi volume pembiayaan bank syariah.

Menurut penelitian Nur Dyah; Rahmatinah (2019) selama periode 2015-2017 menunjukkan bahwa ROA berdampak negatif pada pembiayaan yang disediakan (PYD), sehingga menunjukkan bahwa ketika ROA turun ada peningkatan total distribusi pembiayaan. Demikian pula BOPO ditemukan memiliki dampak negatif pada pembiayaan yang diberikan (PYD), sebaliknya FDR ditemukan memiliki hubungan yang positif dengan PYD.

2.2.3 Kebijakan Makroprudensial terhadap kinerja bank

Perkembangan makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, nilai tukar, dan inflasi akan mencerminkan stabilitas perekonomian yang dapat memengaruhi kinerja sektor keuangan suatu negara

Beberapa penelitian telah berupaya meneliti dampak dari kebijakan makroprudensial / moneter tentang pembiayaan bank. Hasil penelitan Amar, dkk (2015) tentang efektifitas jalur transmisi kebijakan moneter di bank syariah Arab Saudi di tahun 1990 hingga 2013 menunjukkan bahwa pembiayaan bank relatif efektif dalam mempengaruhi output nonmigas swasta tetapi kurang efektif dalam mempengaruhi harga konsumen. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembiayaan yang disalurkan berpengaruh positif dalam peningkatan aktivitas ekonomi.

Menurut Warjiyo (2016), bahwa kebijakan moneter (inflasi, nilai tukar dan suku bunga) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas perbankan. Ditemukan juga bahwa kebijakan moneter biasanya tidak efektif kecuali sistem perbankan sehat dan stabil. Penelitian lain yaitu Firmansyah, (2014); Masudah, (2017) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto dan inflasi memiliki dampak negatif terhadap kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan di Indonesia . Menurut Yoel (2016) menyimpulkan bahwa CAR dan Giro Wajib Minimum (GMW), yang ditentukan melalui kebijakan makroprudensial, cukup efektif dalam mengurangi siklus kredit.

Penelitian yang dilakukan dalam bank syariah, diantaranya Rifai et al. (2017) menemukan bahwa meskipun nilai tukar mungkin memiliki efek negatif, inflasi dan uang yang beredar berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah. Menurut penelitian Bani Pamungkas (2021) menemukan bahwa inflasi dalam jangka panjang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah periode 2002-2011. Demikian pula, menurut penelitian Nur Dyah; Rahmatinah (2019) menemukan bahwa hanya uang yang beredar secara signifikan mempengaruhi pembiayaan syariah.

2.2.4 Branchless Banking / Laku Pandai

Terkait dengan regulasi tentang penerapan branchless banking, beberapa hasil penelitian studi sebelumnya juga telah dilakukan tentang penerapan branchless banking. Aduda dkk (2013) dalam studi yang melibatkan 10 bank komersial dan 12.054 agen bank di Kenya, menunjukkan bahwa perbankan tanpa cabang yang dilakukan melalui agen bank berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank. Di Indonesia, branchless banking adalah “institusi” perbankan yang relatif baru dan diatur melalui POJK No. 19 / POJK. 03/2014.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2011, dalam Sarah, 2011) menjelaskan bahwa branchless banking merupakan strategi yang ditujukan untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat tanpa harus bergantung pada jaringan cabang fisik atau outsourcing pemrosesan transaksi layanan perbankan kepada pihak ketiga. Strategi ini

awalnya hanya diadopsi oleh bank-bank konvensional besar, dan baru-baru ini saja bahwa bank syariah telah mulai mengikutinya. Penelitian Santoso dan Ahmad (2016) membahas kemungkinan mengembangkan keuangan mikro syariah model perbankan tanpa cabang di Indonesia.

Menurut penelitian Nur Dyah; Rahmatinah (2019) regulasi terkait fintech (yaitu POJK No. 19 / POJK.03 / 2014) belum efektif dalam hal pencapaian tujuan, setidaknya dalam hal jangka pendek. Penelitian ini menunjukkan hasil tidak signifikan pada PYD, namun arah positif dari pengaruh tersebut sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya (Sarah, 2015 dan Aduda, et.al., 2013). Hal ini dikarenakan masih sedikitnya jumlah bank syariah yang menggunakan fitur tersebut selama periode 2015-2017, yaitu hanya dua bank syariah (BTPN Islamic dan BRI Islamic).

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian dan Hipotesis

2.3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pandemi Coronavirus Disease merupakan sebuah wabah yang melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyebaran Covid 19 berdampak pada segala aspek kehidupan, tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga berdampak pada semua sektor yang diprediksi akan berlangsung lama (Djalante et al., 2020). Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor ekonomi, termasuk perbankan syariah.

Dampak yang dihadapi oleh perbankan saat ini diantaranya resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional. Untuk mendorong optimalisasi

fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi, Pemerintah mengeluarkan regulasi perbankan untuk memberikan stimulus ekonomi. Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dalam mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan dapat memberikan stimulus yang baik terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah.

Dalam menganalisa efektivitas atau dampak regulasi terhadap kinerja perbankan, khususnya dari sisi pembiayaan bank, variabel yang digunakan adalah Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), Laba atas Aset (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR), Nilai Tukar, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar.

2.3.1.1 Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi, dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat mempengaruhi besarnya modal bank (Ariyani, 2010). CAR merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan

bank, untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi CAR (sesuai ketentuan BI 8%) maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Menurut Anindita (2011) semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Namun ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aktiva yang mengandung risiko maka porsi untuk pembiayaan akan menurun, dan sebaliknya ketika cadangan untuk ATMR tidak terlalu banyak maka porsi yang digunakan pembiayaan akan banyak. Jadi ketika pertumbuhan pembiayaan meningkat mengakibatkan kenaikan ATMR yang kemudian berimplikasi pada turunnya nilai CAR.

2.3.1.2 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan

Menurut Ali (2006), risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan

kurang lancar, diragukan dan macet. Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank, semakin tinggi rasio Non Performing Financing (NPF), maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2017, rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Apabila nilai NPF diatas 5% maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menyebabkan bank akan mengurangi penyaluran kreditnya sehingga mempengaruhi pembiayaan. Bila ini terjadi maka akan berpotensi terhadap kerugian bank, karena jumlah kredit bermasalah semakin besar, yang mengakibatkan bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap kurang berjalannya fungsi intermediasi yang dilakukan bank (Muliaman, dalam Henny, 2013).

Pembiayaan adalah sumber pendapatan utama bagi bank, kinerja bank yang baik ditandai dengan lancarnya penyaluran pembiayaan perbankan kepada masyarakat. Tetapi tingginya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan memberikan resiko yang tinggi pula bagi bank yaitu akan terjadinya pembiayaan bermasalah dan Non Performing Financing (NPF) akan tinggi. Semakin tinggi rasio

NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan dan kredit yang disalurkan.

NPF yang terus meningkat akan menyebabkan turunnya profitabilitas serta kepercayaan nasabah kepada bank syariah yang pada akhirnya nasabah enggan menaruh dananya di bank syariah. Dengan demikian, peningkatan NPF akan menyebabkan turunnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan. Sebaliknya penurunan NPF akan meningkatkan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

2.3.1.3 Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan

Analisis rasio profitabilitas menurut Dendawijaya (2009:118) adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009: 118). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin tinggi ROA semakin tinggi profitabilitas suatu bank dan ketika profitabilitas bank tinggi maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat.

2.3.1.4 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan

Menurut Dendawijaya (2005:116) FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit pada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika Financing to Deposit Ratio (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (85%-100%), dimana bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan baik, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat. Dengan rasio FDR dalam tingkatan 85%-100% menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Apabila rasio lebih tinggi dari 100 % menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank semakin banyak. Namun, semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak

memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat.

2.3.1.5 Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan

Menurut ketentuan Bank Indonesia, BOPO merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya terutama kredit, dimana bunga kredit menjadi pendapatan terbesar perbankan. Menurut Joliana (2013:32) semakin besar rasio BOPO menunjukkan bank yang kurang efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya sehingga kemungkinan besar bank tersebut dalam kondisi bermasalah dan berakibat pada berkurangnya laba dan menurunkan pembiayaan. Sebaliknya semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar yang akan meningkatkan pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, sehingga jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

2.3.1.6 Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Menurut Rahardja dan Mandala Manurung (2004; 155) mengatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan

harga barang – barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus menerus. Sementara menurut Sukirno (2002; 33) inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan pasar bertambah besar dibandingkan dengan penawaran barang pasar. Dalam perbankan, khususnya dalam kegiatan penghimpunan dana, naik turunnya inflasi akan mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun oleh masyarakat. Ketika tingkat inflasi tinggi nasabah lebih memilih menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya, atau mengalihkan uang yang dimiliki untuk membeli aset lain seperti tanah, rumah dan lain lain. Hal tersebut membuat jumlah tabungan yang ada di perbankan syariah menjadi berkurang. Kondisi tersebut akan mempengaruhi permintaan terhadap pembiayaan. Sehingga adapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan inflasi akan berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan perbankan syariah.

2.3.1.7 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Pembiayaan

Kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang dari satu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Menurut Kuncoro (2008), kurs rupiah adalah nilai tular sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US\$ (US Dolar). Nilai tukar tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Jika harga rupiah terhadap dollar melemah, maka permintaan terhadap mata uang dollar akan meningkat. Hal ini disebabkan karena investor cenderung akan melepas rupiah dan akan membeli dollar. Jika kurs valuta asing cenderung

naik, maka nilai mata uang domestik akan turun. Kenaikan inflasi diikuti dengan kenaikan suku bunga dimana naiknya suku bunga akan membuat masyarakat dan para investor memilih menabungkan uangnya daripada memegangnya. Fluktuasi kurs akan berpengaruh terhadap arus investasi yang masuk di Indonesia sehingga akan berdampak pula terhadap pembiayaan pada perbankan syariah.

2.3.1.8 Pengaruh Jumlah Uang yang beredar terhadap Pembiayaan

Jumlah uang beredar adalah banyaknya uang kartal (uang kertas dan logam) dan uang giral (simpanan Rupiah) yang beredar dikalangan masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar maka nilai tukarnya akan semakin lemah dan harga – harga kebutuhan akan naik. Dengan banyaknya uang beredar maka semakin tinggi juga angka inflasi.

Menurut Mishkin, (2008:130) Semakin tinggi uang beredar domestik akan menyebabkan mata uang domestik terdepresiasi. Jika jumlah uang yang beredar terlalu besar maka masyarakat akan lebih banyak menggunakannya untuk proses transaksi sehingga menyebabkan kenaikan harga barang di dalam negeri. Apabila harga yang tinggi di dalam negeri dibanding luar negeri maka masyarakat domestik lebih membeli barang dari luar negeri, sehingga menyebabkan mata uang rupiah akan melemah atau terdepresiasi.

Meningkatnya jumlah uang beredar secara terus menerus akan menyebabkan terjadinya inflasi. Jika jumlah uang beredar terus tumbuh, perekonomian akan terus bergerak pada tingkat harga yang lebih tinggi.

Selama jumlah uang yang beredar meningkat dalam proses terus menerus, inflasi akan timbul. Dalam perbankan, khususnya dalam kegiatan penghimpunan dana, kenaikan inflasi akan mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun oleh masyarakat. Ketika tingkat inflasi tinggi nasabah lebih memilih menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya atau menginvestasikan dalam bentuk yang lain.

2.3.1.9 Pengaruh Branchless Banking / Laku Pandai terhadap Pembiayaan

Dampak dari pandemi covid ini juga berpengaruh pada manajemen strategi Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan covid seperti pembatasan layanan melalui tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dengan memanfaatkan aplikasi digital. Di lain sisi, perbankan dituntut untuk tetap memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah.

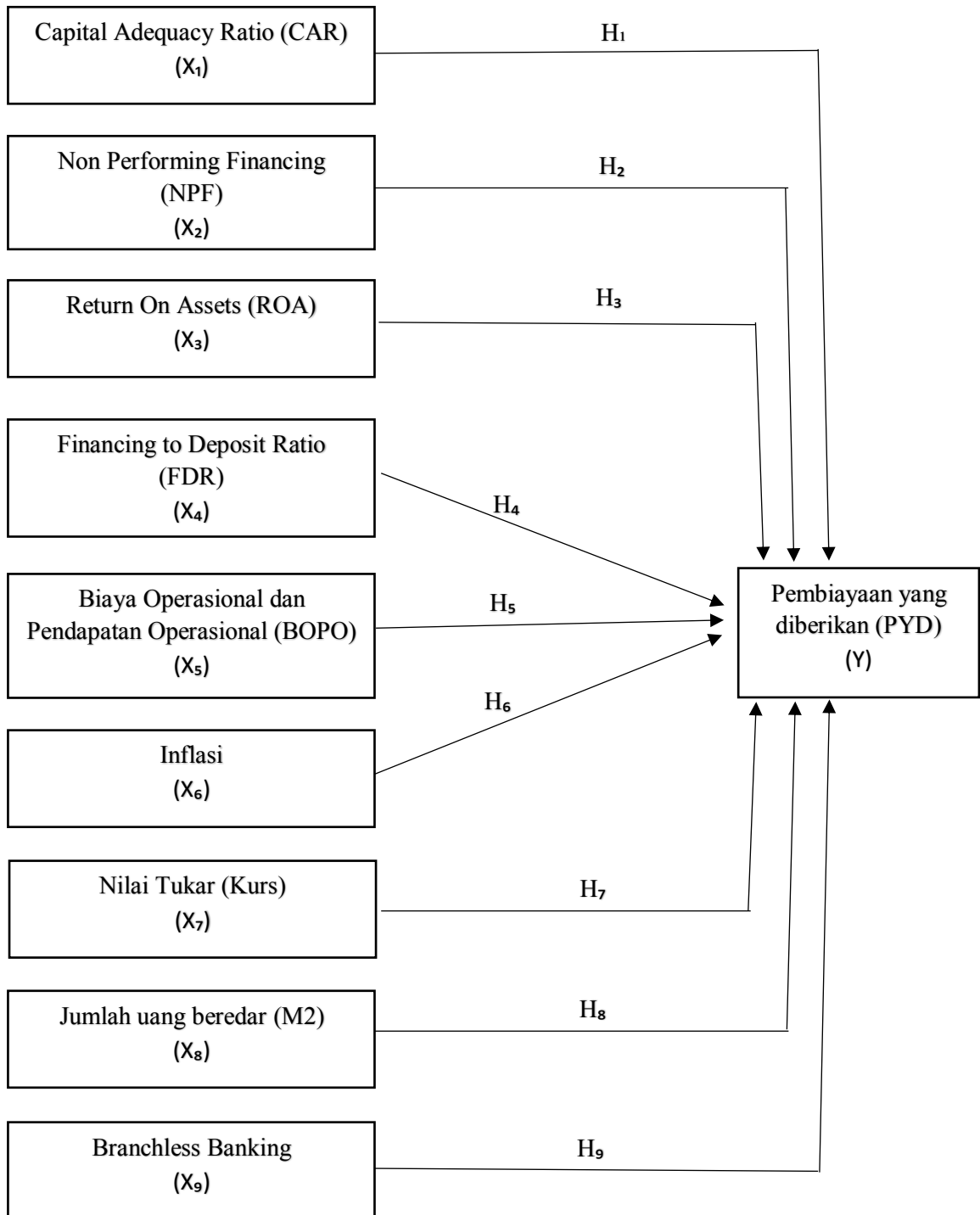
Salah satu inovasi yang dapat meningkatkan kinerja perbankan dalam masa pandemi ini adalah Branchless Banking. Regulasi yang mendukung penerapan pemanfaatan layanan keuangan digital adalah POJK Nomor 19/POJK.03/2014. Dengan diterapkannya regulasi ini secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah di masa pandemi covid-19. Branchless banking merupakan strategi yang ditujukan untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat tanpa harus bergantung pada jaringan cabang fisik atau outsourcing pemrosesan transaksi layanan perbankan kepada pihak ketiga. Dalam masa pandemi

ini, melalui Branchless Banking diharapkan perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan baik dengan tetap meningkatkan akses masyarakat ke layanan jasa keuangan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kebijakan stimulus POJK No.11/POJK.03/2020 dalam mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dan peran POJK Nomor 19/POJK.03/2014 mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dalam meneliti efektivitas atau dampak regulasi terhadap kinerja perbankan, khususnya dari sisi pembiayaan bank, variabel yang digunakan yaitu Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), Laba atas Aset (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR), Nilai Tukar, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar.

Peran dari kebijakan tersebut dapat diketahui dari ada tidaknya pengaruh hubungan antara variabel independent yaitu Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), Laba atas Aset (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR), Nilai Tukar, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar terhadap variabel dependent yaitu Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah. Hubungan tersebut dapat tercermin pada kerangka pemikiran yang tersaji pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Pada gambar 2.1 terlihat bahwa penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) variabel independent yaitu Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), Laba atas Aset (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR), Nilai Tukar, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar serta Branchless Banking dengan Pembiayaan yang diberikan sebagai variabel dependent.

2.3.2 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan
 $H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan
2. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan
 $H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan
3. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Return On Assets (ROA) terhadap Pembiayaan
 $H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Return On Assets (ROA) terhadap Pembiayaan

4. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan
 $H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan
5. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan
 $H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan
6. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Inflasi terhadap Pembiayaan
 $H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Inflasi terhadap Pembiayaan
7. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Nilai Tukar terhadap Pembiayaan
 $H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Nilai Tukar terhadap Pembiayaan
8. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Jumlah uang beredar terhadap Pembiayaan
 $H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Jumlah uang beredar terhadap Pembiayaan
9. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Non Performing Financing (N Branchless Banking PF) terhadap Pembiayaan
 $H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Branchless Banking terhadap Pembiayaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran regulasi atau kebijakan stimulus yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 dalam mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dan peran Nomor 19/POJK.03/2014 dalam pengoptimalan layanan keuangan digital. Dalam meneliti efektivitas atau dampak regulasi terhadap kinerja perbankan, khususnya dari sisi pembiayaan bank, variabel yang digunakan yaitu Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), Laba atas Aset (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR), Nilai Tukar, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar serta Branchless Banking. Peran dari kebijakan tersebut dapat diketahui dari ada tidaknya pengaruh hubungan antara variabel independent yaitu CAR, NPF, ROA, BOPO, FDR, Nilai Tukar, Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Branchless Banking terhadap Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan angka, yang angkanya berwujud bilangan yang dianalisis menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik dan untuk melakukan prediksi suatu variabel. Sedangkan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan yang

bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komperatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

3.2 Populasi dan Sample

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 (dua belas) Bank Umum Syariah Di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan rincian tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT. Bank Mega Syariah
7.	PT. Bank Panin Syariah, Tbk
8.	PT. Bank Syariah Bukopin
9.	PT. BCA Syariah
10.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
11.	PT. Bank Net Indonesia Syariah
12.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Sumber: www.ojk.go.id

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode Purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, dengan cara melihat laporan keuangan triwulanan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut kriteria yang digunakan sebagai penentu sampel adalah sebagai berikut :

- a. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK
- b. Bank Umum Syariah yang memiliki dan mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan (Triwulan 1 tahun 2020 – Triwulan 1 2021).
- c. Bank yang memiliki penertiban pembiayaan yang lengkap di Bank Umum Syariah di Indonesia
- d. Perbankan syariah yang sudah dan belum menerapkan program laku pandai (branchless banking).

Tabel 3.2
Bank Umum Syariah Sampel

No	Bank Umum Syariah	Kriteria				Keterangan
		A	B	C	D	
1.	PT. Bank Aceh Syariah	√	√	√	χ	Sampel 1
2.	PT. Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	√	√	√	χ	Sampel 2
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	√	√	√	√	Sampel 3
4.	PT. Bank Victoria Syariah	√	√	√	χ	Sampel 4
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	√	√	√	χ	Sampel 5
6.	PT. Bank Mega Syariah	√	√	√	χ	Sampel 6
7.	PT. Bank Panin Syariah, Tbk	√	√	√	χ	Sampel 7
8.	PT. Bank Syariah Bukopin	√	√	√	χ	Sampel 8
9.	PT. BCA Syariah	√	√	√	χ	Sampel 9
10.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	√	√	√	√	Sampel 10
11.	PT. Bank Net Indonesia Syariah	χ	χ	χ	χ	-
12.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	√	√	√	√	Sampel 11

Berdasarkan kriteria sebagai penentu pengambilan sampel, dari populasi 12 (dua belas) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka diperoleh sampel sebanyak 11 (sebelas) Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan karena ada 1 (satu) Bank Umum Syariah yaitu PT. Bank Net Indonesia Syariah yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak memiliki dan mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan (Triwulan 1 tahun 2020 – Triwulan 1 2021) serta tidak memiliki penertiban pembiayaan yang lengkap di Bank Umum Syariah di Indonesia.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 9 (sembilan) variabel independent yaitu Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), Laba atas Aset (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR), Nilai Tukar, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar serta Branchless Banking dengan variabel Pembiayaan yang diberikan sebagai variabel dependent.

Untuk memudahkan dalam memberikan penafsiran dan batasan jelas mengenai variabel – variabel yang digunakan, maka dianggap perlu memberikan definisi yang kongkrit terhadap variabel – variabel tersebut. Variabel – variabel yang akan diberikan definisi adalah sebagai berikut :

1. Variabel Terikat (Y) / Dependent Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. . Dalam undang – undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud engan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

2. Variabel Bebas (X) / Independent Variabel

Variabel bebas merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR (X₁), NPF (X₂), ROA (X₃), FDR (X₄), BOPO (X₅), Inflasi (X₆), Nilai Tukar (X₇), Jumlah uang beredar (X₈) dan penerapan Branchless banking (X₉).

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung kemungkinan resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{ATMR \text{ neraca} + ATMR \text{ rekening adm}} \times 100 \%$$

- b. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, menghitung rasio NPF adalah :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

- c. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari total aset (total aktiva) bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset (total aktiva), yang dinyatakan dalam rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

- d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR dihitung dari perbandingan antara total kredit dengan dana pihak ketiga. Perhitungan FDR menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100 \%$$

- e. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Beban operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total biaya bunga dan total biaya operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Perhitungan rasio BOPO menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah :

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

- f. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Dalam perbankan, khususnya dalam kegiatan penghimpunan dana, naik turunnya inflasi akan mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun oleh masyarakat. Semakin tinggi inflasi maka kegiatan penghimpunan dana pada bank sedikit banyak akan berpengaruh.

- g. Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang merupakan perbandingan nilai dua mata uang yang berbeda atau dikenal dengan sebutan kurs. Kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Menurut Kuncoro (2008), kurs rupiah adalah nilai tular sejumlah rupiah yang diperlukan untuk

membeli satu US\$ (US Dolar). Nilai tukar tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Jika harga rupiah terhadap dollar melemah, maka permintaan terhadap mata uang dollar akan meningkat. Hal ini disebabkan karena investor cenderung akan melepas rupiah dan akan membeli dollar.

h. Jumlah uang yang beredar

Jumlah uang yang beredar meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening/tabungan valas milik swasta domestik (Sukirno, 2004:281). Menurut Nopirin (1992:170) jumlah uang yang beredar ditentukan oleh Bank Sentral, namun kenyataannya jumlah uang yang beredar merupakan hasil perilaku dari Bank Sentral, Bank Umum (termasuk lembaga keuangan bukan bank) dan masyarakat. Semakin tinggi uang beredar domestik akan menyebabkan mata uang domestik terdepresiasi.

i. Branchless Banking

Branchless Banking merupakan salah satu program guna mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014. Menurut Otoritas Jasa Keuangan Laku Pandai (layanan keuangan tanpa kantor) adalah penyediaan layanan perbankan / layanan keuangan melalui kerja sama pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan

sarana teknologi informasi. Branchless Banking seperti yang dijelaskan dalam preliminary study Bank Indonesia (2011) merupakan konsep penyediaan layanan perbankan di luar bentuk konvensional bank pada umumnya baik dengan menggunakan layanan teknologi informasi dan teknologi komunikasi (Information, communication and technology/ITC) maupun melalui keterlibatan pihak ketiga (business correspondents).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang dipublikasikan di website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) pada periode Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021.

3.5 Analisis Data

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Teknik analisis data menggunakan alat bantu Software SPSS (*Statistical Package Social Science*).

3.5.1 Uji Deskriptif

Uji deskriptif adalah mengumpulkan dan menganalisa serta menafsirkan data sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran

mengenai keadaan yang diteliti. Uji ini dapat berupa tabel, grafik, nilai rata – rata (mean), nilai tengah (median), standar deviasi dan lain-lainnya.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas multikolinieritas dan autokorelasi. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Merupakan jenis uji statistik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas suatu variabel dapat dideteksi dengan grafik histogram atau uji statistik Kolmogorof-Smirnov (K-S), dengan nilai signifikasinya $> 0,05$.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Jika suatu model regresi mengandung multikolinieritas maka kesalahan standar estimasi akan cenderung meingkat dengan bertambahnya variabel dependen.

Untuk mendeteksi multikolinearitas dapat dideteksi sebagai berikut:

1. Nilai deskriminasi yang sangat tinggi dan diakui dengan nilai F test yang sangat tinggi, serta tidak atau hanya sedikit nilai t test yang signifikan.
2. Meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel dependen dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Value. Batas VIF adalah 10 dan nilai Tolerance Value adalah 0.1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance Value lebih kecil dari 0.1 maka terjadi multikolinearitas dan harus dikelompokkan dari model.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu (timeseries). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini maka akan digunakan uji DW dengan melihat koefisien korelasi Durbin Watson. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik Durbin-Watson (DW test). Adapun kriteria pengujiannya menurut (Setiaji, 2004) adalah

1. Jika nilai D-W diantara 0 sampai 1,5 berarti ada autokorelasi positif;
2. Jika nilai D-W diantara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai D-W diantara 2,5 sampai dengan 4 berarti ada autokorelasi negatif.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variable independen. Adapun rumus dari regresi linier berganda (multiple linier regression) secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Secara spesifik, rumusan umum dari model regresi berganda diberikan persamaan (1). Untuk pengujian empiris, model umum diubah menjadi model logaritma natural dan dirumuskan seperti yang ditunjukkan pada persamaan (2)

$$PYD = \beta_0 + \beta_1 CAR + \beta_2 NPF + \beta_3 KURS + \beta_4 INF + \beta_5 M2 + \beta_6 ROA + \beta_7 BB\ Dummy + \beta_8 BOPO + \beta_9 FDR + \varepsilon \quad (1)$$

$$\ln(PYD) = \beta_0 + \beta_1 CAR + \beta_2 NPF + \beta_3 \ln(KURS) + \beta_4 INF + \beta_5 \ln(M2) + \beta_6 ROA + \beta_7 BB\ Dummy + \beta_8 BOPO + \beta_9 FDR + \varepsilon \quad (2)$$

3.5.4. Uji Hipotesis

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, perlu digunakan analisis regresi melalui uji t maupun uji f. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel - variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan, serta mengetahui besarnya dominasi variabelvariabel independen terhadap variabel dependen. Metode pengujian terhadap hipotesa yang

diajukan dilakukan dengan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan.

a. Uji signifikan simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio), FDR (Financing to Deposit Ratio), Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Return On Asset (ROA).

Langkah–langkah yang dilakukan adalah :

1) Merumuskan Hipotesis (Ha)

Ha diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen .

2) Menentukan tingkat taraf signifikansi yaitu sebesar 0. 05 ($\alpha=0, 05$)

3) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Nilai F hitung dapat

dicari dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R)/(N-K)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Banyaknya koefisien regresi

N = Banyaknya Observasi

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

Sedangkan berdasarkan probabilitas, Ha akan diterima jika probabilitas kurang dari 0, 05.

b. Uji parsial (t test)

Untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak maka digunakan uji t untuk menguji signifikan konstanta variabel.

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$, Maka H_0 ditolak H_a diterima.

2. Jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan nilai signifikansi :

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya variasi dari variabel independen yang mampu menerangkan variabel dependen dalam sebuah penelitian. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika Nilai R^2 yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen kuat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Objek penelitian yang dilakukan adalah Bank Umum Syariah selama periode Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021. Variabel Independent yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), Laba atas Aset (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), Rasio Simpanan Pembiayaan (FDR), Nilai Tukar, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar. Dengan variabel dependent yaitu Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah.

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Dalam undang – undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Tabel 4.1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah
Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021
(dalam jutaan rupiah)

No	Bank	Tahun				
		2020				2021
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw 1
1	Aceh Syariah	1.324.121	1.481.564	1.546.816	1.682.726	1.644.198
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	3.122.316	3.415.671	3.764.471	4.228.511	4.570.437
3	Muamalat Indonesia	14.971.523	15.070.275	15.038.895	15.280.172	15.141.916
4	Victoria Syariah	936.603	980.973	990.826	946.568	799.943
5	Jabar Banten Syariah	1.673.713	1.709.985	1.805.380	1.872.675	1.937.881
6	Mega Syariah	2.192.764	2.272.781	2.357.508	2.190.250	2.541.234
7	Panin Syariah	7.977.082	7.999.487	8.060.852	8.216.876	8.488.037
8	Syariah Bukopin	3.251.659	3.217.641	3.122.132	2.905.424	2.787.221
9	BCA Syariah	4.101.407	4.334.573	4.167.942	4.197.340	4.527.926
10	Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	29.110	18.437	11.025	8.315	6.429
11	Syariah Indonesia	29.153.792	29.664.440	29.481.757	30.150.027	57.697.220

Sumber : www.ojk.go.id

Pada tabel diatas menjelaskan tentang perkembangan pembiayaan Bank Umum Syariah pada periode Triwulan 1 2020 - Triwulan 1 2021. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum pembiayaan yang diberikan bank umum syariah pada periode Triwulan 1 2020 -

Triwulan 1 2021 mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Hal ini menandakan bahwa pada masa pandemi covid 19, perbankan syariah terus mampu menyalurkan pembiayaan dengan baik. Pada awal periode pandemi covid 19 yaitu antara triwulan 1 dan 2 tahun 2020 secara umum terjadi peningkatan pembiayaan di bank umum syariah, walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan. Demikian juga pada triwulan 3 tahun 2020 sampai dengan triwulan 1 tahun 2021, pembiayaan mengalami fluktuasi. Hanya pembiayaan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang mengalami penurunan yang signifikan dari periode triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 1 2021. Untuk pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada periode triwulan 1 2021, hal ini dikarenakan adanya merger antara BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

2. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi, dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko -risiko yang timbul dan dapat mempengaruhi besarnya modal bank (Ariyani, 2010).

Tabel 4.2
Capital Adequacy Ratio (CAR)
Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021
dalam Persen (%)

No	Bank	Tahun				
		2020				2021
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw 1
1	Aceh Syariah	19,16	20,24	18,14	18,60	19,77
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	35,65	32,65	32,04	31,60	31,77
3	Muamalat Indonesia	12,12	12,13	12,48	5,21	15,06
4	Victoria Syariah	20,12	21,78	22,78	24,60	27,83
5	Jabar Banten Syariah	15,68	16,04	16,34	24,14	23,24
6	Mega Syariah	19,37	19,28	21,96	21,15	20,91
7	Panin Syariah	16,08	16,28	15,64	31,43	30,08
8	Syariah Bukopin	14,45	14,67	15,08	22,22	24,11
9	BCA Syariah	38,36	38,45	39,57	45,26	44,96
10	Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	42,44	42,28	43,09	49,44	50,70
11	Syariah Indonesia	16,43	17,41	17,68	16,88	23,1

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditunjukkan bahwa rasio CAR pada Bank Umum Syariah periode triwulan 1 2020 – triwulan 1 2021 dalam keadaan baik, dengan nilai diatas 8 %. Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai CAR pada masing – masing bank umum syariah mengalami fluktuasi, secara umum CAR mengalami kenaikan dan penurunan selama periode penelitian. Pada awal periode pandemi covid 19 yaitu antara triwulan 1 dan 2 tahun 2020 secara umum terjadi peningkatan

rasio CAR di bank umum syariah, walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan.

Rasio CAR pada Bank Muamalat mengalami penurunan yang signifikan pada triwulan 4 tahun 2020, yaitu dari 12,48 % di triwulan 3 menjadi 5,21 % di triwulan 4 tahun 2020. Sedangkan pada Bank Panin Syariah rasio CAR mengalami kenaikan yang signifikan pada triwulan 4 tahun 2020 yaitu dari 15,64% di triwulan 3 tahun 2020 menjadi 31,43 % di triwulan 4 tahun 2021. Pada bank Syariah bukopin, rasio CAR mengalami kenaikan yang signifikan dari awal periode penelitian, yaitu sebesar 14,45 % di triwulan 1 tahun 2020 menjadi 24,11% di triwulan 1 tahun 2021.

3. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank, semakin tinggi rasio Non Performing Financing (NPF), maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.

Tabel 4.3
Non Performing Financing (NPF)
Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021
dalam Persen (%)

No	Bank	Tahun				
		2020				2021
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw 1
1	Aceh Syariah	1,48	1,64	1,70	1,53	1,62
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1,43	1,45	1,65	1,26	1,40
3	Muamalat Indonesia	5,62	5,70	5,69	4,81	4,93
4	Victoria Syariah	4,89	4,58	4,69	4,73	5,49
5	Jabar Banten Syariah	3,91	3,96	3,86	5,28	4,65
6	Mega Syariah	2,55	2,27	4,33	1,69	1,48
7	Panin Syariah	3,93	3,77	3,68	3,38	4,95
8	Syariah Bukopin	6,32	7,10	7,19	7,49	7,71
9	BCA Syariah	0,67	0,69	0,53	0,50	0,58
10	Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	1,43	1,79	1,87	1,91	2,10
11	Syariah Indonesia	2,49	2,57	2,66	2,51	3,09

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio NPF pada masing – masing bank umum syariah pada periode penelitian mengalami fluktuatif. Pada awal periode pandemi covid 19 yaitu triwulan 1 dan 2 tahun 2020 rasio NPF pada bank umum syariah rata – rata mengalami kenaikan, dengan rasio NPF tertinggi ada pada Bank Syariah Bukopin yaitu sebesar 7,10 %, sedangkan rasio NPF terendah ada pada bank BCA Syariah yaitu sebesar 0,69 %. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2017, rasio pembiayaan bermasalah

nilainya kurang dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Pada periode penelitian, rasio NPF dari Bank Aceh Syariah, Bank BPD NTB Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah dan BTPN Syariah serta BSI mengalami fluktuatif, namun bank tersebut mampu menjaga NPF dibawah 5%.

Pada bank Muamalat Indonesia, rasio NPF pada triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 3 2020 diatas 5%, namun pada triwulan 4 2020 dan triwulan 1 2021 mengalami penurunan menjadi dibawah 5%. Pada Bank Victoria Syariah, rasio NPF mengalami penurunan pada triwulan 2 2020 namun kemudian mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,49% pada triwulan 1 tahun 2021. Pada Bank Jabar Banten Syariah, rasio NPF mengalami kenaikan di triwulan 4 tahun 2020 yaitu sebesar 5,28%, namun kemudian mengalami penurunan di triwulan 1 tahun 2021 menjadi sebesar 4,65%. Pada Bank Bukopin Syariah, rasio NPF mengalami kenaikan setiap triwulannya, yaitu dari 6,32% di triwulan 1 tahun 2020 menjadi 7,71% di triwulan 1 tahun 2021. Jika dikaitkan dengan pembiayaan pada Bank Bukopin Syariah, terlihat bahwa pembiayaan mengalami penurunan disaat terjadi kenaikan NPF.

4. Return on Assets (ROA)

Return on Assets digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi

bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009: 118). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin tinggi ROA semakin tinggi profitabilitas suatu bank dan ketika profitabilitas bank tinggi maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat.

Tabel 4.4
Return On Assets (ROA)
Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021
dalam Persen (%)

No	Bank	Tahun				
		2020				2021
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw 1
1	Aceh Syariah	1,58	1,67	1,72	1,73	2,32
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1,79	1,84	1,84	1,74	1,16
3	Muamalat Indonesia	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
4	Victoria Syariah	0,15	0,02	0,07	0,16	0,80
5	Jabar Banten Syariah	0,47	0,44	0,57	0,41	0,06
6	Mega Syariah	1,08	0,95	1,32	1,74	3,18
7	Panin Syariah	0,26	0,04	0,004	0,06	0,10
8	Syariah Bukopin	0,04	0,02	0,02	0,04	0,01
9	BCA Syariah	0,87	0,89	0,89	1,09	0,89
10	Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	13,58	6,96	5,80	7,16	11,36
11	Syariah Indonesia	1,74	1,73	1,68	1,65	1,72

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio ROA pada masing – masing bank umum syariah pada periode penelitian mengalami

fluktuatif. Pada awal periode pandemi covid 19 yaitu triwulan 1 dan 2 tahun 2020 rasio ROA pada bank umum syariah rata – rata mengalami penurunan, dengan rasio ROA tertinggi pada BTPN Syariah pada triwulan 1 tahun 2020 yaitu sebesar 13,58%. Sedangkan ROA terendah pada Bank Panin Syariah pada triwulan 3 tahun 2020 yaitu sebesar 0,004%. Pada Bank Aceh Syariah rasio ROA mengalami kenaikan selama periode penelitian, dengan nilai terendah 1,58% di triwulan 1 2020 dan nilai tertinggi 2,32% di triwulan 1 tahun 2021. Untuk bank umum syariah lain, nilai ROA mengalami fluktuatif. Namun untuk Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Bukopin serta BCA Syariah memiliki nilai ROA dibawah standart ketentuan Bank Indonesia yaitu 1,5%.

5. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Dendawijaya (2005:116) FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR dihitung dari perbandingan antara total kredit dengan dana pihak ketiga.

Rasio FDR merupakan salah satu indikator likuiditas yang menentukan apakah bank dikatakan likuid atau tidak yang mana rasio FDR minimal harus di angka 75% dan maksimal di angka 110%. Namun tingkat FDR bank harus dijaga agar selalu berada dalam batas normal yaitu antara 85%-100%.

Tabel 4.5
Financing to Deposit Ratio (FDR)
Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021
dalam Persen (%)

No	Bank	Tahun				
		2020				2021
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw 1
1	Aceh Syariah	73,77	70,66	64,10	70,82	71,95
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	70,27	70,31	73,47	86,53	83,01
3	Muamalat Indonesia	73,77	74,81	73,80	69,84	66,72
4	Victoria Syariah	79,08	79,85	76,21	74,05	63,99
5	Jabar Banten Syariah	96,29	100,67	92,74	86,64	95,61
6	Mega Syariah	97,24	83,73	76,19	63,94	58,92
7	Panin Syariah	98,21	105,47	93,87	111,71	117,45
8	Syariah Bukopin	109,87	161,11	181,84	196,73	175,97
9	BCA Syariah	96,39	94,40	90,06	81,32	90,59
10	Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	94,69	92,37	98,48	97,37	92,16
11	Syariah Indonesia	74,13	74,16	74,56	73,98	77,28

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio FDR pada bank umum syariah pada periode penelitian mengalami fluktuatif dan dalam keadaan baik. Pada awal periode pandemi covid 19 yaitu triwulan 1 dan 2 tahun 2020 rasio FDR pada bank umum syariah rata – rata mengalami kenaikan. Namun pada Bank Muamalat Indonesia, Victoria Syariah dan Mega Syariah nilai rasio FDR pada triwulan 1 tahun 2021 memiliki nilai terendah yaitu berada dibawah 75%. Jika dikaitkan dengan pembiayaan,

pada Bank Muamalat dan Bank Victoria Syariah pada triwulan 1 tahun 2021 pada saat terjadi penurunan nilai FDR, juga mengalami penurunan pembiayaan.

6. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya terutama kredit, dimana bunga kredit menjadi pendapatan terbesar perbankan. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%.

Tabel 4.6
Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)
Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021
dalam Persen (%)

No	Bank	Tahun				
		2020				2021
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw 1
1	Aceh Syariah	84,12	82,67	81,62	81,50	74,61
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	80,76	80,04	80,29	81,39	88,00
3	Muamalat Indonesia	97,94	98,19	98,38	99,45	98,51
4	Victoria Syariah	98,17	99,78	97,90	96,93	92,61
5	Jabar Banten Syariah	95,09	95,22	93,74	95,41	99,26
6	Mega Syariah	93,08	92,81	90,13	85,52	77,10

No	Bank	Tahun				
		2020				2021
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw 1
7	Panin Syariah	97,41	99,86	100,20	99,42	98,91
8	Syariah Bukopin	98,86	99,08	98,96	97,73	99,40
9	BCA Syariah	90,00	89,53	89,32	86,28	88,61
10	Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	54,85	72,07	77,20	72,42	57,23
11	Syariah Indonesia	82,87	81,26	81,95	81,81	79,90

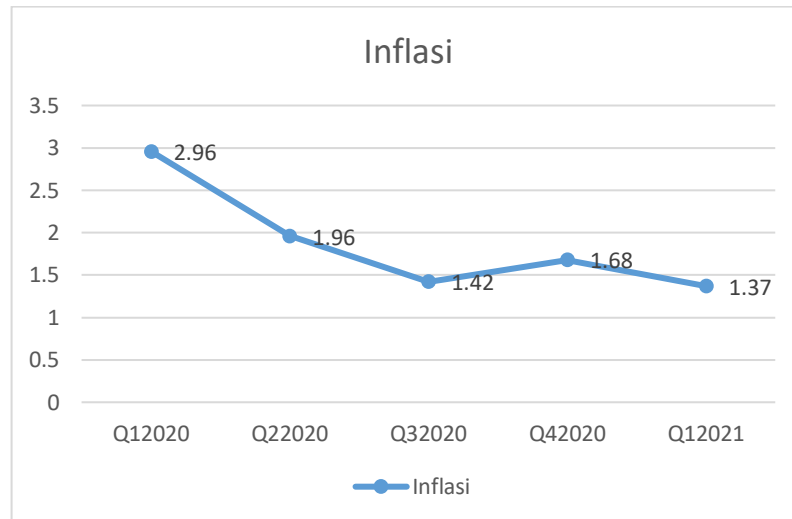
Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio FDR pada bank umum syariah pada periode penelitian mengalami fluktuatif. Pada awal periode pandemi covid 19 yaitu triwulan 1 dan 2 tahun 2020 rasio BOPO pada bank umum syariah rata – rata mengalami kenaikan. Secara umum, nilai BOPO Bank Umum Syariah pada periode penelitian memiliki nilai yang baik yaitu di bawah 90%. Selama periode penelitian, nilai BOPO terendah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah di triwulan 1 tahun 2020 yaitu senilai 54,85%. Sedangkan yang tertinggi di Triwulan 3 tahun 2020 pada Bank Panin Syariah yaitu senilai 100,20%.

7. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. . Dalam perbankan, khususnya dalam kegiatan penghimpunan dana, naik turunnya inflasi akan mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun oleh masyarakat.

Grafik 4.1
Inflasi
Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021
dalam Persen (%)



Sumber : Bank Indonesia, data diolah

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pergerakan Inflasi fluktuatif tinggi di triwulan 1 2020 kemudian turun sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 dan kemudian naik di triwulan 4 tahun 2020 kemudian turun lagi pada triwulan 1 tahun 2021. Nilai Inflasi tertinggi terjadi pada awal periode penelitian yaitu triwulan 1 tahun 2020 yaitu sebesar 2,96%. Sedangkan angka terendah terjadi pada triwulan 1 tahun 2021 yaitu sebesar 1,37%. Perkembangan Inflasi cenderung fluktuatif mengikuti kondisi perekonomian sebagai dampak dari Pandemi Covid 19 yang melanda dunia tak terkecuali di Indonesia.

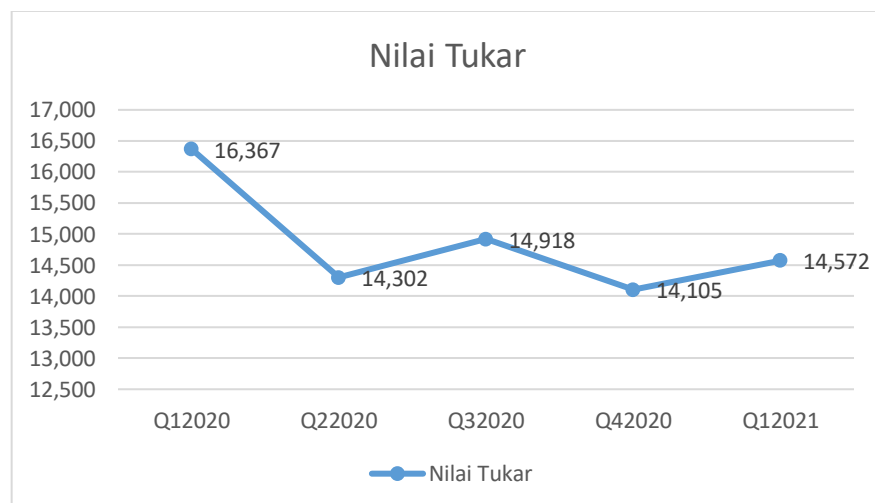
Dampak dari pandemi covid menimbulkan potensi terganggunya stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurunnya nilai inflasi pada periode penelitian dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat yaitu kecenderungan

penurunan permintaan dan daya beli serta perputaran uang yang bersumber dari penurunan aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi Covid 19, dan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Selain itu, penyebab rendahnya inflasi juga karena permintaan kredit yang rendah, sedangkan jumlah dana pihak ketiga (DPK) atau tabungan masyarakat terus meningkat untuk mengantisipasi dampak pandemi.

8. Nilai Tukar

Kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang dari satu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Menurut Kuncoro (2008), kurs rupiah adalah nilai tular sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US\$ (US Dolar).

Grafik 4.2
Nilai tukar
Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021
dalam Rupiah (Rp)



Sumber ; Bank Indonesia, data diolah

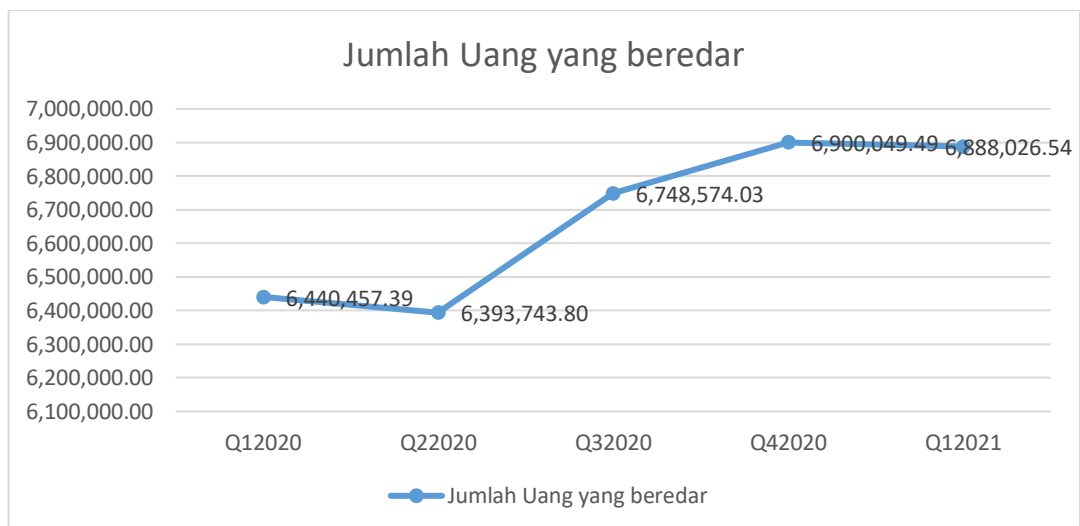
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pergerakan Nilai Tukar terjadi kenaikan dan penurunan fluktuatif dari triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 1 tahun 2021. Nilai Tukar tertinggi terjadi pada awal periode penelitian yaitu triwulan 1 tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 16.367,- Sedangkan angka terendah terjadi pada triwulan 4 tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 14.105,-. Sejak terjadi pandemi corona 19, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS mengalami fluktuasi yang cukup besar seiring dengan ketidakpastian yang terjadi di pasar seiring dengan kebijakan upaya pencegahan seperti pemberlakuan PSBB di berbagai daerah, penutupan sekolah, work from home, penghentian beberapa moda transportasi umum, dan larangan mudik yang membuat roda perputaran ekonomi melambat.

Berdasarkan Laporan pemerintah Tahun Anggaran 2020 tentang Pelaksanaan APBN pada Semester 1 2020, pelemahan nilai tukar rupiah dikarenakan meluasnya pandemi Covid 19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menyebabkan meningkatnya resiko ketidakpastian global sehingga para investor cenderung mengalihkan dana investasinya ke safe haven asset, seperti emas, obligasi pemerintah negara maju, dan mata uang dunia seperti dolar Amerika Serikat. Aksi tersebut mengakibatkan terjadinya arus modal keluar (*capital outflow*) dari negara – negara *emerging market*, termasuk Indonesia, yang menyebabkan terjadinya depresiasi hampir seluruh mata uang dunia terhadap dolar AS.

9. Jumlah uang yang beredar

Jumlah uang beredar adalah banyaknya uang kartal (uang kertas dan logam) dan uang giral (simpanan Rupiah) yang beredar dikalangan masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar maka nilai tukarnya akan semakin lemah dan harga – harga kebutuhan akan naik. Dengan banyaknya uang beredar maka semakin tinggi juga angka inflasi.

Grafik 4.3
Jumlah uang yang beredar
Triwulan 1 2020 – Triwulan 1 2021
dalam milyar Rupiah (Rp)



Sumber ; Bank Indonesia, data diolah

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pergerakan jumlah uang yang beredar mengalami kenaikan dan penurunan fluktuatif dari triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 1 tahun 2021. Sempat mengalami penurunan di triwulan 2 2020 namun kemudian mengalami kenaikan di triwulan 3 dan 4 tahun 2020 kemudian menurun lagi di triwulan 1 2021. Jumlah uang yang beredar terendah terjadi pada

triwulan 2 tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 6.393.743,80 (milyar). Sedangkan angka tertinggi terjadi pada triwulan 4 tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 6.900.049,49 (milyar). Peningkatan jumlah uang beredar di masa pandemi ini merupakan sinyal positif bagi pemulihan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar mengindikasikan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi. Namun jika jumlah uang yang beredar terlalu besar, akan menyebabkan nilai uang turun yang kemudian akan mendorong terjadinya inflasi.

10. Branchless Banking

Dampak dari pandemi covid ini juga berpengaruh pada manajemen strategi Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Salah satu inovasi yang dapat meningkatkan kinerja perbankan dalam masa pandemi ini adalah Branchless Banking. Branchless banking merupakan strategi yang ditujukan untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat tanpa harus bergantung pada jaringan cabang fisik atau outsourcing pemrosesan transaksi layanan perbankan kepada pihak ketiga. Dalam masa pandemi ini, melalui Branchless Banking diharapkan perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan baik dengan tetap meningkatkan akses masyarakat ke layanan jasa keuangan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Deskriptif

Data deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang bisa dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi, dari variabel Pembiayaan, CAR, NPF, ROA, FDR, BOPO, Inflasi, Nilai Tukar, Jumlah uang yang beredar dan BBDummy.

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif berdasarkan Variabel Pembiayaan, CAR, NPF, ROA, FDR, BOPO, Inflasi, Nilai Tukar, Jumlah uang yang beredar dan BBDummy

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan	55	8,77	17,87	14,6903	1,96438
CAR	55	12,12	50,70	24,9258	10,54764
NPF	55	,50	7,71	3,2378	1,97676
ROA	55	,00	13,58	1,5919	2,63838
FDR	55	58,92	196,73	90,4209	28,52924
BOPO	55	54,85	100,20	88,8245	10,60342
Inflasi	55	1,37	2,96	1,8780	,58578
Nilai Tukar	55	9,55	9,70	9,6045	,05320
Jumlah Uang beredar	55	15,67	15,75	15,7132	,03297
BBDummy	55	0	1	,27	,449
Valid N (listwise)	55				

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah observasi atau jumlah penelitian ini sebanyak 55 data/sampel yang diambil dari laporan triwulanan dari 11 bank umum syariah yang dijamin sampel pada periode triwulan 1 2020 – triwulan 1 2021. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa Pembiayaan memiliki nilai terendah sebesar 8,77%, nilai tertinggi 17,87% dan rata – rata sebesar 14,69%. Dari nilai tersebut

menunjukkan adanya variasi yang tidak signifikan dalam hal pembiayaan diantara bank umum syariah yang dijadikan sampel. Sedangkan standar deviasi untuk Pembiayaan adalah sebesar 1,964%. Rendahnya nilai standar deviasi dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) mengindikasikan hasil yang baik.

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai terendah sebesar 12,12 %, tertinggi sebesar 50,70 % dan rata – rata sebesar 24,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik selama periode penelitian besarnya *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sudah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia minimal 8%. Dari nilai tersebut menunjukkan kesenjangan yang signifikan pada tingkat kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi. Sedangkan standar deviasi untuk *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebesar 10,54%. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* mempunyai sebaran kecil karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata – rata *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, sehingga simpangan data pada variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* ini dapat dikatakan baik.

Non Performing Financing (NPF) memiliki nilai terendah sebesar 0,50% dan tertinggi sebesar 7,71%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya *Non Performing Financing (NPF)* tidak memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu dibawah 5%. Sedangkan rata – rata sebesar 3,23% dengan standar deviasi sebesar 1,97. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam

variabel *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai sebaran kecil karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata – rata *Non Performing Financing* (NPF), sehingga simpangan data pada variabel *Non Performing Financing* (NPF) ini dapat dikatakan baik.

Return on Assets (ROA) memiliki nilai terendah sebesar 0,00% dan tertinggi sebesar 13,58%. Dari nilai tersebut menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam tingkat keuntungan diantara bank umum syariah yang dijadikan sampel. Secara statistik selama periode penelitian besarnya *Return on Assets* (ROA) tidak memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu diatas 1,5%. Sedangkan rata – rata sebesar 1,59% dan standar deviasi sebesar 2,63%. Rendahnya nilai standar deviasi dibandingkan nilai rata – rata *Return on Assets* (ROA) mengindikasikan hasil yang baik.

Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki nilai terendah sebesar 58,92% dan tertinggi sebesar 196,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) selama periode penelitian tidak memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu berkisar antara 80%-110%. Dari nilai tersebut menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam tingkat likuiditas diantara bank umum syariah yang dijadikan sampel. Sedangkan untuk nilai rata – rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 90,42% dengan standart deviasi sebesar 28,52%. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya (mean), sehingga

simpangan data pada variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini dikatakan baik.

Beban Operasional – Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki nilai terendah sebesar 54,85 % dan yang tertinggi sebesar 100,20%. Dari nilai tersebut menunjukkan adanya variasi yang besar dalam tingkat efisiensi antara bank umum syariah yang dijadikan sampel. Sedangkan rata-rata BOPO adalah 88,82% dengan nilai standar deviasi sebesar 10,60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel BOPO mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya (mean), sehingga simpangan data pada variabel BOPO ini dapat dikatakan baik.

Inflasi memiliki nilai terendah sebesar 1,37% dan yang tertinggi sebesar 2,96%. Perkembangan Inflasi cenderung fluktuatif mengikuti kondisi perekonomian sebagai dampak dari Pandemi Covid 19. Sedangkan untuk nilai rata – rata sebesar 1,87% dan standart deviasi sebesar 0,58%. Rendahnya nilai standar deviasi dibandingkan nilai rata-rata (mean) Inflasi mengindikasikan hasil yang baik.

Nilai tukar memiliki nilai terendah sebesar 9,55% dan yang tertinggi sebesar 9,70%. Sedangkan untuk nilai rata – rata sebesar 9,60% dan standart deviasi sebesar 0,05 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel Nilai tukar mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya (mean), sehingga simpangan data pada variabel Nilai tukar ini dapat dikatakan baik.

Jumlah uang yang beredar memiliki nilai terendah sebesar 15,67% dan yang tertinggi sebesar 15,75%. Sedangkan untuk nilai rata – rata sebesar 15,71% dan standart deviasi sebesar 0,03 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel jumlah uang yang beredar mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya (mean), sehingga simpangan data pada variabel jumlah uang yang beredar ini dapat dikatakan baik.

Tabel 4.8
Statistik Frekuensi untuk Branchless Banking

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum menerapkan BB	40	72,7	72,7	72,7
	Sudah menerapkan BB	15	27,3	27,3	100,0
	Total	55	100,0	100,0	

Variabel Branchless Banking merupakan variabel dummy, “1” jika perusahaan sudah menerapkan Branchless Banking, dan “0” jika perusahaan belum menerapkan Branchless Banking. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang sudah menerapkan Branchless Banking sebesar 15 (27,3%) dan yang belum menerapkan Branchless Banking sebesar 40 (72,7%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bank umum syariah yang dijadikan sampel belum menerapkan Branchless Banking.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

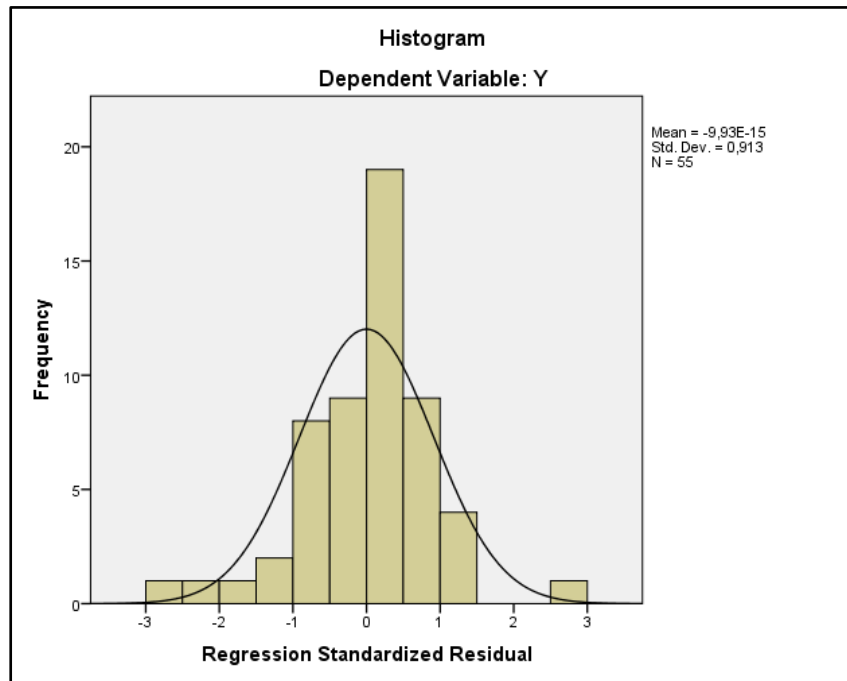
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model ideal atau menghasilkan estimator linier yang tidak bias. Untuk menguji apakah model yang digunakan diterima secara ekonometri dan apakah estimator, maka dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen maupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal.

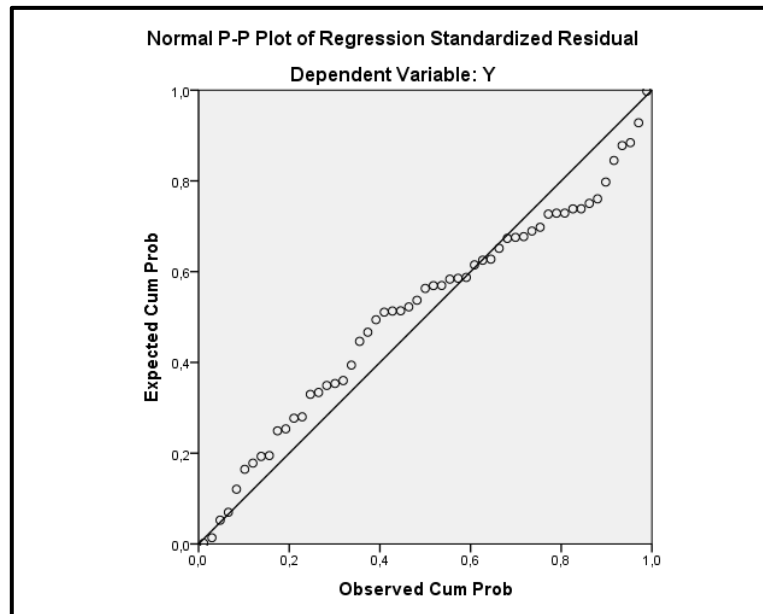
Untuk melihat normalitas suatu variabel dapat dideteksi dengan grafik histogram atau uji statistik Kolmogorof-Smirnov (K-S), dengan nilai signifikasinya $> 0,05$. Uji normalitas yang pertama dengan melihat grafik secara histogram sebagaimana terlihat dalam grafik 4.4 di bawah ini :

Grafik 4.4
Grafik Histogram



Dari grafik diatas terlihat bahwa pola distribusi data dari semua variabel mempunyai distribusi normal. Metode yang kedua yang bisa digunakan untuk uji normalitas adalah dengan Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

Grafik 4.5
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan grafik 4.5 diatas, terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Selain menggunakan analisis grafik histogram dan P-P Plot, untuk menguji data terdistribusi normal atau tida tidak, dapat juga dilihat dengan uji Kolmogorov Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2013):

Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Jika probabilitas $< 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4.9
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96175539
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,110
	Negative	-,112
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,084 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, diketahui nilai probablitas p atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,084. Hal ini berarti data terdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi, karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas.

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai antar variabel independent dari nilai tolerance dan variance inflating factor (VIF)

Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai tolerance :

1. Jika nilai tolerance > 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas
2. Jika nilai tolerance < 0,10 artinya terjadi multikolinearitas

Sedangkan untuk pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai

VIF :

1. Jika nilai VIF < 10,00 artinya tidak terjadi multikolinearitas
2. Jika nilai VIF > 10,00 artinya terjadi multikolinearitas

Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-76,680	106,258		-,722	,474					
	X1	-,044	,024	-,234	-1,824	,075	-,603	-,262	-,133	,324	3,084
	X2	-,195	,162	-,196	-1,203	,235	,207	-,177	-,088	,200	5,001
	X3	-,978	,160	-1,313	-6,118	,000	-,747	-,674	-,447	,116	8,644
	X4	,010	,007	,142	1,341	,187	-,076	,196	,098	,474	2,111
	X5	-,098	,042	-,530	-2,349	,023	,529	-,331	-,171	,105	9,558
	X6	,185	,529	,055	,349	,729	,004	,052	,025	,214	4,680
	X7	1,764	4,513	,048	,391	,698	,004	,058	,029	,357	2,805
	X8	5,394	6,845	,091	,788	,435	-,005	,117	,058	,404	2,478
	X9	1,615	,413	,370	3,908	,000	-,080	,503	,285	,596	1,678

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, maka dapat diketahui nilai tolerance dan

VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

- 1) Nilai tolerance untuk variabel X1 (CAR) sebesar $0,324 > 0,10$, dan VIF sebesar $3,08 < 10$, sehingga variabel CAR dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas;
- 2) Nilai tolerance untuk variabel X2 (NPF) sebesar $0,20 > 0,10$, dan VIF sebesar $5,00 < 10$, sehingga variabel NPF dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas;

- 3) Nilai tolerance untuk variabel X3 (ROA) sebesar $0,11 > 0,10$, dan VIF sebesar $8,64 < 10$, sehingga variabel ROA dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas;
- 4) Nilai tolerance untuk variabel X4 (FDR) sebesar $0,47 > 0,10$, dan VIF sebesar $2,11 < 10$, sehingga variabel FDR dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas;
- 5) Nilai tolerance untuk variabel X5 (BOPO) sebesar $0,105 > 0,10$, dan VIF sebesar $9,55 < 10$, sehingga variabel BOPO dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas;
- 6) Nilai tolerance untuk variabel X6 (Inflasi) sebesar $0,21 > 0,10$, dan VIF sebesar $4,68 < 10$, sehingga variabel Inflasi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas;
- 7) Nilai tolerance untuk variabel X7 (Nilai Tukar) sebesar $0,35 > 0,10$, dan VIF sebesar $2,80 < 10$, sehingga variabel Nilai Tukar dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas;
- 8) Nilai tolerance untuk variabel X8 (Jumlah uang yang beredar) sebesar $0,40 > 0,10$, dan VIF sebesar $2,47 < 10$, sehingga variabel Jumlah uang yang beredar dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas;
- 9) Nilai tolerance untuk variabel X9 (Branchless Banking) sebesar $0,59 > 0,10$, dan VIF sebesar $1,67 < 10$, sehingga variabel Jumlah uang yang beredar dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas;

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier berganda terdapat korelasi antara pengganggu (residual) pada periode t dengan residual periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji Durbin-Waston (DW test).

Field (2009) menyatakan nilai statistik dari uji Durbi-Watson yang lebih besar dari (greater than) 2 atau lebih kecil (less than) dari -2 diindikasikan terkena autokorelasi.

Tabel 4.11
Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	,872 ^a	,760	,712	1,05355	,760	15,859	9	45	,000	1,018

a. Predictors: (Constant), X9, X8, X2, X7, X4, X3, X1, X6, X5
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, nilai dari uji Durbin-Watson adalah 1,018, dimana nilai tersebut berada diantara -2 dan 2, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (multiple linear regression). Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode regresi dan dihitung dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 4.12
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-76,680	106,258		-,722	,474					
	X1	-,044	,024	-,234	-1,824	,075	-,603	-,262	-,133	,324	3,084
	X2	-,195	,162	-,196	-1,203	,235	,207	-,177	-,088	,200	5,001
	X3	-,978	,160	-1,313	-6,118	,000	-,747	-,674	-,447	,116	8,644
	X4	,010	,007	,142	1,341	,187	-,076	,196	,098	,474	2,111
	X5	-,098	,042	-,530	-2,349	,023	,529	-,331	-,171	,105	9,558
	X6	,185	,529	,055	,349	,729	,004	,052	,025	,214	4,680
	X7	1,764	4,513	,048	,391	,698	,004	,058	,029	,357	2,805
	X8	5,394	6,845	,091	,788	,435	-,005	,117	,058	,404	2,478
	X9	1,615	,413	,370	3,908	,000	-,080	,503	,285	,596	1,678

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Pembiayaan} = -76,680 - 0,044\text{CAR} - 0,195\text{NPF} - 0,978\text{ROA} + 0,010\text{FDR} - 0,098\text{BOPO} + 0,185\text{Inflasi} + 1,764\text{Nilai Tukar} + 5,394\text{Jumlah uang yang beredar} + 1,615\text{BBDummy} + \varepsilon$$

Persamaan regresi linier berganda diatas, diketahui mempunyai konstanta sebesar -76,680. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel – variabel independen CAR, NPF, ROA, FDR, BOPO, Inflasi, Nilai Tukar, Jumlah uang yang beredar dan Branchless banking diasumsikan dalam keadaan tetap, maka variabel dependen Pembiayaan akan turun sebesar 76,680.

Koefisien regresi variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar – 0,044 artinya jika CAR mengalami penurunan satu satuan maka Pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,044 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel NPF sebesar $-0,195$ artinya jika NPF mengalami penurunan satu satuan maka Pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar $0,195$ dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi variabel ROA sebesar $-0,978$ artinya jika ROA mengalami penurunan satu satuan maka Pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar $0,978$ dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel FDR sebesar $0,010$ artinya jika FDR mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka Pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar $0,010$ dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi variabel BOPO sebesar $-0,098$ artinya jika BOPO mengalami penurunan satu satuan maka Pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar $0,098$ dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel Inflasi sebesar $0,185$ artinya jika Inflasi mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka Pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar $0,185$ dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi variabel Nilai Tukar sebesar $1,764$ artinya jika Nilai Tukar mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka Pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar $1,764$ dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel Jumlah uang yang beredar sebesar $5,394$ artinya jika FDR mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka Pembiayaan

akan mengalami kenaikan sebesar 5,394 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi variabel Branchless Banking sebesar 1,615 artinya jika Branchless Banking mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka Pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar 1,615 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

4.3 Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, perlu digunakan analisis regresi melalui uji t maupun uji f. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan, serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode pengujian terhadap hipotesa yang diajukan dilakukan dengan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan.

a. Uji Parsial (t test)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak maka digunakan uji t untuk menguji signifikan konstanta variabel.

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$, Maka H_0 ditolak

H_a diterima.

2. Jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan nilai signifikansi :

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Tabel 4.13
Hasil perhitungan uji t

Model		Coefficients ^a										
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta					Zero-order	Partial	Part	Tolerance
1	(Constant)	-76,680	106,258		-,722	,474						
	X1	-,044	,024	-,234	-1,824	,075	-,603	-,262	-,133	,324	3,084	
	X2	-,195	,162	-,196	-1,203	,235	,207	-,177	-,088	,200	5,001	
	X3	-,978	,160	-1,313	-6,118	,000	-,747	-,674	-,447	,116	8,644	
	X4	,010	,007	,142	1,341	,187	-,076	,196	,098	,474	2,111	
	X5	-,098	,042	-,530	-2,349	,023	,529	-,331	-,171	,105	9,558	
	X6	,185	,529	,055	,349	,729	,004	,052	,025	,214	4,680	
	X7	1,764	4,513	,048	,391	,698	,004	,058	,029	,357	2,805	
	X8	5,394	6,845	,091	,788	,435	-,005	,117	,058	,404	2,478	
	X9	1,615	,413	,370	3,908	,000	-,080	,503	,285	,596	1,678	

a. Dependent Variable: Y

Diketahui nilai koefisien dari CAR adalah $-0,044$, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti CAR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah $-1,824$, maka hasil dari perbandingan t hitung dan t tabel adalah $-1,824 > -2,0141$, maka H_0 diterima artinya bahwa CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai Signifikansi dari variabel CAR adalah $0,075 > 0,05$, maka CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

2. Variabel NPF (X2)

Diketahui nilai koefisien dari NPF adalah $-0,195$, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan. Diketahui nilai

statistik t (t hitung) adalah -1,203, maka hasil dari perbandingan t hitung dan t tabel adalah $-1,203 > -2,0141$, maka H_0 diterima artinya bahwa NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai Signifikansi dari variabel NPF adalah $0,235 > 0,05$, maka NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

3. Variabel ROA (X3)

Diketahui nilai koefisien dari ROA adalah $-0,978$, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti ROA berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah -6,118, maka hasil dari perbandingan t hitung dan t tabel adalah $-6,118 < -2,0141$, maka H_0 ditolak artinya bahwa ROA secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai Signifikansi dari variabel ROA adalah $0,000 < 0,05$, maka ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

4. Variabel FDR (X4)

Diketahui nilai koefisien dari FDR adalah 0,010, yakni bernilai positif. Hal ini berarti FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah 1,341, maka hasil dari perbandingan t hitung dan t tabel adalah $1,341 < 2,0141$, maka H_0 diterima artinya bahwa FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai Signifikansi dari variabel FDR adalah $0,187 > 0,05$, maka FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

5. Variabel BOPO (X5)

Diketahui nilai koefisien dari BOPO adalah -0,098, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti BOPO berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan. Diketahui nilai

statistik t (t hitung) adalah -2,349, maka hasil dari perbandingan t hitung dan t tabel adalah $-2,349 < -2,0141$, maka H_0 ditolak artinya bahwa ROA secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai Signifikansi dari variabel BOPO adalah $0,023 < 0,05$, maka BOPO berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

6. Variabel Inflasi (X6)

Diketahui nilai koefisien dari Inflasi adalah 0,185, yakni bernilai positif. Hal ini berarti Inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah 0,349, maka hasil dari perbandingan t hitung dan t tabel adalah $0,349 < 2,0141$, maka H_0 diterima artinya bahwa Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai Signifikansi dari variabel Inflasi adalah $0,729 > 0,05$, maka Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

7. Variabel Nilai Tukar (X7)

Diketahui nilai koefisien dari Nilai tukar adalah 1,764, yakni bernilai positif. Hal ini berarti Nilai tukar berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah 0,391, maka hasil dari perbandingan t hitung dan t tabel adalah $0,391 < 2,0141$, maka H_0 diterima artinya bahwa Nilai tukar secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai Signifikansi dari variabel nilai tukar adalah $0,698 > 0,05$, maka nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

8. Variabel Jumlah uang beredar (X8)

Diketahui nilai koefisien dari jumlah uang yang beredar adalah 5,394, yakni bernilai positif. Hal ini berarti jumlah uang yang beredar berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah 0,788, maka hasil dari perbandingan t hitung dan t tabel adalah $0,788 < 2,0141$, maka H_0 diterima artinya bahwa jumlah uang yang beredar secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai Signifikansi dari variabel jumlah uang yang beredar adalah $0,435 > 0,05$, maka jumlah uang yang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

9. Variabel Branchless Banking (X9)

Diketahui nilai koefisien dari Branchless Banking adalah 1,615, yakni bernilai positif. Hal ini berarti Branchless Banking berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah 3,908, maka hasil dari perbandingan t hitung dan t tabel adalah $3,908 > 2,0141$, maka H_0 ditolak artinya bahwa penerapan Branchless banking secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai Signifikansi dari variabel Branchless Banking adalah $0,000 < 0,05$, maka Branchless Banking berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh CR, NPF, ROA, FDR, BOPO, Inflasi, Nilai tukar, Jumlah uang yang beredar dan Branchless Banking terhadap Pembiayaan.

Perhitungan uji F ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158,426	9	17,603	15,859	,000 ^b
	Residual	49,949	45	1,110		
	Total	208,374	54			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X9, X8, X2, X7, X4, X3, X1, X6, X5

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai F Hitung 15,859 dan nilai Sig. adalah 0,000.

Selanjutnya menentukan nilai F Tabel :

$$Df1 = k - 1 = 10 - 1 = 9$$

$$Df2 = n - Df1 - 1 = 55 - 9 - 1 = 45$$

maka nilai F tabel dengan $df1 = 9$; $df2 = 45$ dan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 adalah 2,0957. Diketahui nilai F hitung $15,859 > F$ tabel 2,0957 dan nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak, artinya CAR, NPF, ROA, FDR, BOPO, Inflasi, nilai tukar, jumlah uang yang beredar dan penerapan branchless banking secara bersama – sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

c. Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi (adjusted R²) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Apabila angka koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai Koefisien determinasi (adjusted R²) yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas. Besarnya nilai Adjusted R² dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,872 ^a	,760	,712	1,05355

Predictors: (Constant), X9, X8, X2, X7, X4, X3, X1, X6, X5_a
Dependent Variable: Y_b

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, diketahui pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dengan nilai Adjusted R² yaitu 0,712 atau 71,2%. Hal ini berarti 71,2 % variasi Pembiayaan yang bisa dijelaskan oleh variasi dari semua variabel bebas atau independen yaitu CAR, NPF, ROA, FDR, BOPO, Inflasi, nilai tukar, jumlah uang yang beredar dan penerapan Branchess banking secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar 28,8 % dijelaskan oleh sebab – sebab lain di luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas lain di luar variabel independen.

4.4 Pembahasan

Dalam masa pandemi covid 19 saat ini, perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Perbankan syariah akan menghadapi beberapa kemungkinan resiko, seperti resiko pembiayaan macet (NPF), resiko pasar dan resiko likuiditas yang pada akhirnya akan memiliki dampak terhadap kinerja dan profitabilitas perbankan syariah (Wahyudi, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel CAR, NPF, FDR, Inflasi, Nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan variabel ROA, BOPO dan penerapan branchless banking mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan untuk variabel CAR, NPF, ROA, FDR, BOPO, Inflasi, Nilai tukar, jumlah uang yang beredar dan penerapan branchless banking secara bersama – sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu, variabel CAR, NPF, ROA, dan BOPO ditemukan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan untuk variabel FDR, Inflasi, Nilai tukar, jumlah uang yang beredar, dan penerapan branchless banking memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan.

Hasil dari pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu dari perhitungan regresi diperoleh hasil koefisien regresi variabel CAR sebesar $-0,044$, berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Ketika CAR mengalami

penurunan satu satuan maka pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,044. Hubungan ini dapat dijelaskan bahwa CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan modal, surat berharga dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. (Herman Darmawi (99;2011). Artinya ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aktiva yang mengandung resiko maka porsi untuk pembiayaan akan menurun, dan sebaliknya ketika cadangan untuk ATMR tidak terlalu banyak maka porsi yang digunakan pembiayaan akan banyak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam masa pandemi ini, salah satu dampaknya adalah penurunan pendapatan masyarakat yang menyebabkan naiknya pembiayaan sehingga terjadi kenaikan ATMR yang berimplikasi pada penurunan nilai CAR. Namun berdasarkan data dapat ditunjukkan bahwa rasio CAR pada masing – masing Bank Umum Syariah pada masa pandemi periode triwulan 1 2020 – triwulan 1 2021 dalam keadaan baik, dengan nilai diatas 8 %. Dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa ketika adanya stimulus, nilai CAR turun sehingga bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan dan dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan pembiayaan. Dengan demikian variabel stimulus CAR berpengaruh positif terhadap total pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah selama periode stimulus. Dari hasil temuan ini sejalan dengan adanya stimulus, yang diharapkan akan merangsang peningkatan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa

pandemi covid 19. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh penelitian Nur Dyah; Rahmatina (2019), namun berbeda dengan hasil penelitian Sudarsono (2017) dan Bakti (2018).

2. Pengaruh NPF terhadap pembiayaan

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu dari perhitungan regresi diperoleh hasil koefisien regresi variabel NPF sebesar $-0,195$, berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Ketika NPF mengalami penurunan satu satuan maka pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar $0,195$.

Pandemi covid 19 telah mengganggu kesehatan perbankan syariah melalui jalur perburukan kualitas kredit. Upaya untuk mencegah penularan covid melalui pembatasan pergerakan masyarakat yang menyebabkan banyak korporasi dan UMKM mengalami penurunan pendapatan yang akhirnya mengancam kemampuan mereka dalam membayar kewajibannya di bank. Pada awal periode pandemi covid 19 yaitu triwulan 1 dan 2 tahun 2020 rasio NPF pada bank umum syariah rata – rata mengalami kenaikan. Untuk mencegah dampak covid terhadap kualitas kredit, pada bulan Maret 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang restrukturisasi pada kredit yang terdampak covid 19. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perbankan.

Terkait pengaruh NPF terhadap pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif. Hal ini berarti bahwa restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah menurunkan jumlah kredit bermasalah

sehingga nilai NPF turun. Ketika NPF turun, maka kepercayaan masyarakat menjadi naik, sehingga pengumpulan dana dari nasabah lebih optimal sehingga bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan dan dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan pembiayaan. Sebaliknya dengan rasio NPF yang tinggi akan menurunkan tingkat pembiayaan, hal ini disebabkan karena ketika terjadi banyak pembiayaan bermasalah, bank perlu berhati – hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan sehingga pembiayaan yang diberikan harus melalui proses seleksi, hal ini berakibat penyaluran pembiayaan menjadi sedikit. Banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran akan berdampak pada pendapatan yang dibagi antara bank dan nasabah. Artinya semakin sedikit pendapatan bank diakibatkan banyak pembiayaan yang bermasalah sehingga berdampak pada pembiayaan yang menurun. Temuan ini sejalan dengan temuan Bakti (2018), namun berbeda dengan hasil penelitian dari Whidaningayu (2015). Dari hasil temuan mengimplikasikan bahwa ketika ada stimulus yang mengakibatkan nilai NPF turun, maka terjadi peningkatan pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah. Dengan demikian variabel stimulus NPF berpengaruh positif terhadap total pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah selama periode stimulus. Hal ini sejalan dengan tujuan stimulus yang dikeluarkan akibat dari dampak dari pandemi covid 19.

3. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu dari perhitungan regresi diperoleh hasil koefisien regresi variabel ROA sebesar $-0,978$, berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Ketika ROA mengalami penurunan satu satuan maka pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar $0,978$.

Terkait pengaruh ROA terhadap pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif. Artinya bahwa ketika dampak pandemi covid yang berimbas pada kenaikan pembiayaan dan adanya stimulus, dimana perbankan memilih skema restrukturisasi melalui penundaan pembayaran dan pemberian keringanan margin (bagi hasil), maka menyebabkan turunnya laba perbankan yang kemudian akan berimplikasi pada turunnya nilai ROA. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur Dyah dan Rahmatina (2019), namun tidak sejalan dengan penelitian Umiyati et al (2017) yang menyatakan bahwa ROA dan FDR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil temuan mengimplikasikan bahwa ketika ada stimulus, kenaikan pembiayaan yang diikuti penurunan laba menyebabkan nilai ROA turun. Dengan demikian variabel stimulus ROA berpengaruh positif terhadap total pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah selama periode stimulus. Hal ini sejalan dengan tujuan stimulus yang dikeluarkan akibat dari dampak dari pandemi covid 19.

4. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu dari perhitungan regresi diperoleh hasil koefisien regresi variabel FDR sebesar 0,010, berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Ketika FDR mengalami kenaikan satu satuan maka pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,010.

Terkait pengaruh FDR terhadap pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif. FDR merupakan seberapa besar pembiayaan yang disalurkan mampu membayar kembali dana pihak ketiga yang ada di bank tersebut. Semakin tinggi rasio ini menandakan bank mampu membayar kembali penarikan DPK masyarakat. Dalam penelitian ini nilai FDR berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah. Artinya apabila nilai FDR meningkat maka jumlah pembiayaan akan meningkat. Artinya bahwa dampak pandemi covid tidak hanya berimbas pada kenaikan pembiayaan, tetapi berpengaruh juga dengan kenaikan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Hal ini disebabkan karena di masa pandemi covid 19 masyarakat lebih berhati – hati dalam mengelola keuangannya. Sehingga ketika pembiayaan naik diikuti oleh kenaikan dana pihak ketiga maka nilai NPF akan naik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Umiyati dkk (2017); Nur Dyah dan Rahmatina (2019). Dengan demikian variabel stimulus FDR berpengaruh positif terhadap total pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah selama periode stimulus. Hal ini sejalan dengan tujuan stimulus yang dikeluarkan akibat dari dampak dari pandemi covid 19.

5. Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu dari perhitungan regresi diperoleh hasil koefisien regresi variabel BOPO sebesar $-0,098$, berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Ketika BOPO mengalami penurunan satu satuan maka pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar $0,098$.

Dalam penelitian ini terkait pengaruh BOPO terhadap pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif. Semakin besar rasio BOPO menunjukkan bank kurang efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya sehingga kemungkinan besar bank tersebut dalam kondisi bermasalah dan berakibat pada berkurangnya laba dan menurunkan pembiayaan. Sebaliknya semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar yang akan meningkatkan pembiayaan. Ketika terjadi kenaikan pembiayaan di masa pandemi, dan adanya stimulus dari pemerintah berupa restrukturisasi, maka perbankan bisa menekan nilai NPF yang mengakibatkan penurunan biaya kebutuhan pencadangan sehingga mengakibatkan nilai BOPO turun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Masudah (2017) dan Nur Dyah, Rahmatina (2019). Dengan demikian variabel stimulus BOPO berpengaruh positif terhadap total pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah selama

periode stimulus. Hal ini sejalan dengan tujuan stimulus yang dikeluarkan akibat dari dampak dari pandemi covid 19.

6. Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu dari perhitungan regresi diperoleh hasil koefisien regresi variabel Inflasi sebesar 0,185, berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Ketika Inflasi mengalami kenaikan satu satuan maka pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,815.

Terkait pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif. Pada kondisi inflasi tinggi, maka akan menyebabkan harga barang menjadi relatif lebih mahal sehingga daya beli masyarakat menjadi menurun atau kemampuan masyarakat untuk membeli barang melalui pembiayaan, hal ini menyebabkan permintaan terhadap pembiayaan meningkat seiring dengan tingginya inflasi. Namun menurut data, pada masa pandemi ini nilai inflasi lebih rendah dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi covid 19. Inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,68%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 3,13% dan pada tahun 2019 sebesar 2,72%. Dampak dari pandemi covid menimbulkan potensi terganggunya stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurunnya nilai inflasi pada periode penelitian dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat yaitu kecenderungan penurunan permintaan dan daya beli serta perputaran uang yang bersumber dari penurunan aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi Covid 19. Namun pandemi covid 19 juga

berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat, menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melalui pembiayaan. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap pembiayaan meningkat. Ketika terjadi peningkatan pembiayaan di masa pandemi ini, maka akan meningkatkan resiko kredit bermasalah. Sehingga peran regulasi tentang stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah akan memberikan dampak positif dimana perbankan dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari pandemic covid 19. Sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Hasil penelitian ini dimana inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan sejalan dengan penelitian Rifai et al.,(2017), namun tidak sejalan dengan penelitian Firmansyah (2014); Masudah (2017); Nur Dyah, Rahmatina (2019).

7. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Pembiayaan

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu dari perhitungan regresi diperoleh hasil koefisien regresi variabel Nilai Tukar sebesar 1,764, berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Ketika Nilai Tukar mengalami kenaikan satu satuan maka pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar 1,764.

Terkait pengaruh Nilai tukar terhadap pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif. Sejak terjadi pandemi corona 19, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS mengalami fluktuasi cenderung menguat. Fluktuasi yang cukup besar ini dikarenakan ketidakpastian

yang terjadi di pasar seiring dengan kebijakan upaya pencegahan seperti pemberlakuan lockdown negara – negara di dunia, penutupan sekolah, work from home, penghentian beberapa moda transportasi umum yang membuat roda perputaran ekonomi melambat. Penguatan nilai tukar di masa pandemi ini diikuti oleh naiknya investasi dan sektor riil yang kemudian berdampak pula terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Ketika terjadi peningkatan pembiayaan di masa pandemi ini, maka akan meningkatkan resiko kredit bermasalah. Sehingga peran regulasi tentang stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah akan memberikan dampak positif dimana perbankan dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari pandemic covid 19, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Hasil penelitian ini dimana nilai tukar berpengaruh positif terhadap pembiayaan tidak sejalan dengan penelitian Rifai et al., (2017); Nur Dyah, Rahmatina (2019).

8. Pengaruh Jumlah uang yang beredar terhadap Pembiayaan

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa Jumlah uang yang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu dari perhitungan regresi diperoleh hasil koefisien regresi variabel Jumlah uang yang beredar sebesar 5,394, berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Ketika Jumlah uang yang beredar mengalami kenaikan satu satuan maka pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar 5,394.

Terkait pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif. Bertambahnya jumlah

uang beredar memberi peluang bagi perbankan untuk melakukan fungsi intermediasi. Pada masa pandemi covid 19 ini berpengaruh pada kenaikan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Kenaikan dana pihak ketiga di masa pandemi covid 19 ini disebabkan karena masyarakat lebih berhati – hati dalam mengelola keuangannya. Peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat direspon perbankan syariah dengan peningkatan pembiayaan. Jika peningkatan dana pihak ketiga tidak segera disalurkan dalam pembiayaan, bank syariah akan mengalami kerugian akibat adanya kewajiban untuk memberikan nisbah terhadap DPK yang telah dihimpun (Tohari, 2010: 86). Ketika terjadi peningkatan pembiayaan di masa pandemi ini, maka akan meningkatkan resiko kredit bermasalah. Sehingga peran regulasi tentang stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah akan memberikan dampak positif dimana perbankan dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari pandemic covid 19. Sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Hasil penelitian ini dimana jumlah uang yang beredar berpengaruh positif terhadap pembiayaan tidak sejalan dengan penelitian Rifai et al., (2017); Nur Dyah, Rahmatina (2019).

9. Pengaruh penerapan Branchless Banking terhadap Pembiayaan

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa penerapan branchless banking berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu dari perhitungan regresi diperoleh hasil koefisien regresi variabel penerapan branchless banking sebesar 1,615, berpengaruh positif terhadap

pembiayaan. Ketika penerapan branchless banking mengalami kenaikan satu satuan maka pembiayaan akan mengalami kenaikan sebesar 1,615.

Terkait pengaruh penerapan branchless banking terhadap pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona, seperti physical distancing dan mengurangi layanan tatap muka maka berdampak pada perubahan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi perbankan. Perubahan ini membuat perbankan harus mampu beradaptasi dan melakukan langkah strategis untuk bertahan dalam meningkatkan portofolionya. Dampak dari pandemi ini menyebabkan menurunnya transaksi perbankan secara langsung, hal ini mengakibatkan bank-bank berpikir keras untuk meningkatkan performancenya, menekan biaya operasional serta strategi yang tepat menghadapi disruption yang serba tidak terduga.

Salah satu strategi inovasi untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah dalam masa pandemi covid-19, adalah dengan cara meningkatkan layanan keuangan digital. Penerapan aktifitas perbankan berbasis teknologi dapat memungkinkan untuk merangkul target pasar yang lebih luas dan efisiensi dari biaya operasional bank. Layanan keuangan tanpa kantor atau disebut laku pandai (branchless banking) sebagai suatu unit bisnis yang dimiliki perbankan dalam melayani nasabahnya melalui agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka mendekatkan diri ke nasabahnya, menjadi penopang di masa pandemic dan pasca pandemic atau masa normal baru. Penguatan sistem layanan yang dilakukan dengan berbasis teknologi,

menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi branchless banking memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen khususnya bisnis UMKM, yaitu dengan melakukan terobosan melalui kerjasama dengan marketplace (Harahap, 2020c). Upaya ini akan sangat bermanfaat ketika bisnis dipaksa untuk "bergeser" karena keadaan darurat, karena pandemi dapat mengintensifkan promosi melalui aplikasi online. Pelaku bisnis UMKM yang memiliki modal dan akses yang terbatas, membuat branchless banking memiliki peranan yang cukup besar dan strategis memanfaatkan keadaan saat ini, menjadi mitra bisnis yang tepat melalui layanan produk yang diberikan bagi konsumen melalui e-commerce (Harahap, 2020b). Khususnya pada bisnis yang paling berdampak, seperti pedagang tradisional pada saat pandemi ini membuka wawasan masyarakat dan pedagang melakukan aktifitas bisnis melalui transaksi elektronik dengan sistem digitalisasi (Harahap, 2020a).

Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan Branchless banking secara parsial signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan. Artinya bank yang sudah menerapkan branchless banking akan meningkatkan pembiayaan. Karena dengan sistem kantor tanpa cabang akan mengurangi biaya operasional, peningkatan pangsa pasar, dapat menjangkau segmen pelanggan yang lebih luas serta efektivitas biaya. Pemanfaatan teknologi utamanya digunakan untuk mendorong penyaluran kredit perseroan sembari meningkatkan pendapatan margin bagi hasil. Namun untuk meningkatkan performa pelayanan perbankan, Branchless banking harus fokus dan adaptif, serta harus selalu melakukan terobosan melalui inovasi produk yang dipasarkan seperti ; mengembangkan

fitur - fitur terbaru pada perangkat software untuk melengkapi layanan seperti ; pembukaan rekening secara digital, peminjaman dana, pengelolaan tagihan kartu kredit, pengembangan e-wallet, pengembangan QR payment dan lainnya. Dalam kondisi pandemi covid-19 ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan dan mengoptimalkan layanan keuangan digital ini tanpa harus datang ke bank untuk mendapatkan layanan keuangan secara langsung. Hasil penitian ini dimana penerapan branchless banking berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sejalan dengan penelitian Sarah (2015); Aduda, et.al., (2013), namun Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Nur Dyah, Rahmatina (2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Salah satu sektor yang terdampak pandemi covid -19 adalah sektor perbankan. Dampak yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi, Pemerintah mengeluarkan regulasi perbankan untuk memberikan stimulus ekonomi yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Penelitian ini mencoba meneliti peran regulasi perbankan pada perbankan syariah di Indonesia di masa pandemi, melalui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa ROA, BOPO dan penerapan Branchless Banking berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan CAR, NPF, FDR,

Inflasi, Nilai Tukar dan Jumlah Uang beredar tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Dampak pandemi covid 19 terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan resiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi stimulus berperan positif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia pada masa pandemi covid 19. Hal ini terlihat dari pengaruh negatif dari CAR, NPF, ROA dan BOPO serta pengaruh positif dari FDR, Inflasi, nilai tukar dan jumlah uang yang beredar terhadap pembiayaan yang diberikan perbankan syariah pada masa pandemi covid 19. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah. Stimulus dikeluarkan untuk mengurangi peningkatan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi peningkatan resiko kredit dan kenaikan pembiayaan di masa pandemi, serta adanya stimulus dari pemerintah berupa restrukturisasi, maka dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Terkait regulasi layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan branchless banking berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan

perbankan syariah pada masa pandemi covid 19. Penerapan aktifitas perbankan berbasis teknologi dapat mengurangi biaya operasional, peningkatan pangsa pasar, menjangkau segmen pelanggan yang lebih luas serta efektivitas biaya. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona, seperti physical distancing dan mengurangi layanan tatap muka maka berdampak pada perubahan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi perbankan. Layanan keuangan tanpa kantor atau disebut laku pandai (branchless banking) sebagai suatu unit bisnis yang dimiliki perbankan dalam melayani nasabahnya melalui agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi salah satu alternatif bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan di tengah keterbatasan akibat dari dampak pandemi covid 19. Dalam kondisi pandemi covid-19 ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan dan mengoptimalkan layanan keuangan digital ini tanpa harus datang ke bank untuk mendapatkan layanan keuangan secara langsung untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan beberapa saran yang dapat direkomendasikan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia serta penelitian lanjutan yang diperlukan. Saran – saran tersebut antara lain :

1. Berdasarkan temuan bahwa stimulus memberikan dampak yang positif terhadap pembiayaan, maka peraturan serupa dapat diberlakukan untuk regulator di masa depan apabila terjadi force majeure.
2. Otoritas berupaya mendorong perbankan syariah dalam menerapkan dan menggunakan branchless banking, untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah khususnya pada masa pandemi covid 19.
3. Dalam kondisi pandemi covid-19 ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan dan mengoptimalkan layanan keuangan digital yang diberikan oleh perbankan.
4. Untuk meningkatkan performa pelayanan perbankan, Branchless banking harus focus dan adaptif, serta harus selalu melakukan terobosan melalui inovasi produk yang dipasarkan seperti ; mengembangkan fitur - fitur terbaru pada perangkat software untuk melengkapi layanan seperti ; pembukaan rekening secara digital, peminjaman dana, pengelolaan tagihan kartu kredit, pengembangan e-wallet, pengembangan QR payment dan lainnya.

5. Hasil penelitian ini terbatas pada pengamatan yang relatif pendek selama 5 triwulan yaitu triwulan 1 tahun 2020 sampai dengan triwulan 1 tahun 2021. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang.
6. Diharapkan bagi akademisi yang akan meneliti selanjutnya mengenai penelitian ini, dapat menambah atau mengurangi variabel dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aduda, J., Kiragu, P. and Ndwiga, J.M. (2013), "The relationship between agency banking and financial performance of commercial banks in Kenya", *Journal of Finance and Investment Analysis*, Vol. 2 No. 4, pp. 97-117.
- Awdeh, A., El-Moussawi, C. and Machrouh, F. (2011), "The effect of capital requirements on banking risk", *International Research Journal of Finance and Economics*, Vol. 66, pp. 133-146.
- Bakti, N.S. (2018), "Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF terhadap pembiayaan pada perbankan syariah", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 17 No. 2, pp. 15-28.
- Barth, J.R., Caprio, G., Jr and Levine, R. (2001), "Banking systems around the globe: do regulation and ownership affect performance and stability?", *Prudential Supervision: What Works and What Doesn't*, University of Chicago Press, Chicago, pp. 31-96.
- Barth, J.R., Nolle, D.E. and Rice, T.N. (1997), "Commercial banking structure, regulation, and performance: an international comparison", *Managerial Finance*, Vol. 23 No. 11, pp. 1-39.
- Deby, S (2019), "Pengaruh FDR, NPF, ROA dan BOPO Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia'.
- Dendawijaya, L. (2005), *Manajemen Perbankan*, Second Edition, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ekarina, K. (2014), "Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di indonesia".
- Endang, H. (2015), "Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR), Beban Operasional-Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return on Asset (ROA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri".
- Gujarati, D.N. (2004), *Basic Econometrics*, fourth edition. Tata McGraw-Hill Education, New York, NY.
- Harahap, D. A. (2020a, April 14). *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19*. Radar Bandung, p. 9. Retrieved from <https://www.radarbandung.id/2020/04/14/pembatasan-sosial-berskala-besar-psbbmenangani-pandemi-covid-19-dan-tren-pembelian-online/>
- Harahap, D. A.(2020b, May 21). *Covid 19 dan Transformasi Saluran Pembelian Online*. Opinions InfoBrand,p.1.Retrieved from <https://infobrand.id/covid19-dan-transformasi-saluranpembelianonline.phtml>

- Harahap, D. A. (2020c, June 11). *Literasi Branchless Banking*. Harian Pikiran Rakyat, p.15. Retrieved from <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/26822>
- Islamic banking in Indonesia”, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 3 No. 1, pp. 25-60
- IIA (2014), *Statement of Islamic Financial Accounting Standards (Sharia PSAK) Revised January 1*, Indonesian Institute of Accountants, Jakarta.
- Kasri, R.A., Arundina, T., Indraswari, K.D. and Prasetyo, M.B. (2017), “Bank run and stability of
- Lotto, J. (2016), “*Efficiency of capital adequacy requirements in reducing Risk-Taking behavior of Tanzanian commercial banks*”, *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 7, p. 21.
- Masudah, M. (2017), “*Determinan volume pembiayaan bank umum syariah Indonesia*”, *IKONOMIKA*, Vol. 2 No. 1, pp. 53-62.
- Naceur, S.B. and Omran, M. (2011), “*The effects of bank regulations, competition, and financial reforms on banks’ performance*”, *Emerging Markets Review*, Vol. 12 No. 1, pp. 1-20.
- Nur Dyah, N dan Rahmatina, AW (2019), “*The role of banking regulation in the development of Islamic banking financing in Indonesia*”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.12 No. 5, 2019, pp.643-662
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.
- Rifai, S.A., Susanti, H. and Setyaningrum, A. (2017), “*Analisis pengaruh kurs rupiah, laju inflasi, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating*”, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 1, pp. 13-27
- Santoso, B. and Ahmad, K. (2016), “*Islamic microfinance branchless banking model in Indonesia*”, *Intellectual Discourse*, Vol. 24.
- Sarah, H. (2011), “*Dampak branchless banking terhadap kinerja keuangan PT bank muamalat indonesia Tbk*”, *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol. 3 No. 2, pp. 2337-6333.

- Sarah, H. (2015), “*Dampak branchless banking terhadap kinerja keuangan PT bank muamalat Indonesia tbk*”, Al-Muzara’ah, Vol. 3 No. 2, pp. 136-157.
- Sari, G.N. (2013), “*Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit/pembiayaan bank umum di Indonesia (periode 2008.1-2012.2)*”, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, pp. 931-941.
- Sudarsono, H. (2017), “*Modelling respon rasio keuangan terhadap pembiayaan pada bank syariah Di Indonesia*”, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), Vol. 7 No. 1, pp. 1-13.
- Whidaningayu, E. (2015), “*Analisis pengaruh non performing financing dan financing to deposit ratio terhadap volume pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia dengan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel mediasi*”, JRKA, Vol. 1 No. 1, pp. 14-28
- Umiyati, L.T.A. (2017), “*Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah devisa di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 5 No. 1, pp. 39-61.
- Zhang, Z.Y., Jun, W.U. and Liu, Q.F. (2008), “*Impacts of Capital adequacy regulation on risk-taking behaviors of banking*”, Systems Engineering - Theory and Practice, Vol. 28 No. 8, pp. 183-189.

LAMPIRAN

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	55	8,77	17,87	14,6903	1,96438
X1	55	12,12	50,70	24,9258	10,54764
X2	55	,50	7,71	3,2378	1,97676
X3	55	,00	13,58	1,5919	2,63838
X4	55	58,92	196,73	90,4209	28,52924
X5	55	54,85	100,20	88,8245	10,60342
X6	55	1,37	2,96	1,8780	,58578
X7	55	9,55	9,70	9,6045	,05320
X8	55	15,67	15,75	15,7132	,03297
X9	55	0	1	,27	,449
Valid N (listwise)	55				

Correlations											
		Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
Pearson Correlation	Y	1,000	-,603	,207	-,747	-,076	,529	,004	,004	-,005	-,080
	X1	-,603	1,000	-,551	,613	-,003	-,576	-,132	-,126	,202	,049
	X2	,207	-,551	1,000	-,410	,556	,648	-,103	-,069	,065	,013
	X3	-,747	,613	-,410	1,000	-,103	-,879	,049	,066	,003	,463
	X4	-,076	-,003	,556	-,103	1,000	,308	-,040	-,054	,022	-,214
	X5	,529	-,576	,648	-,879	,308	1,000	,008	-,014	-,053	-,382
	X6	,004	-,132	-,103	,049	-,040	,008	1,000	,783	-,736	,000
	X7	,004	-,126	-,069	,066	-,054	-,014	,783	1,000	-,478	,000
	X8	-,005	,202	,065	,003	,022	-,053	-,736	-,478	1,000	,000
	X9	-,080	,049	,013	,463	-,214	-,382	,000	,000	,000	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,000	,064	,000	,289	,000	,490	,489	,484	,281
	X1	,000	.	,000	,000	,490	,000	,168	,180	,070	,361
	X2	,064	,000	.	,001	,000	,000	,226	,308	,318	,464
	X3	,000	,000	,001	.	,228	,000	,362	,316	,492	,000
	X4	,289	,490	,000	,228	.	,011	,387	,348	,436	,058
	X5	,000	,000	,000	,000	,011	.	,478	,459	,351	,002
	X6	,490	,168	,226	,362	,387	,478	.	,000	,000	,500
	X7	,489	,180	,308	,316	,348	,459	,000	.	,000	,500
	X8	,484	,070	,318	,492	,436	,351	,000	,000	.	,500
	X9	,281	,361	,464	,000	,058	,002	,500	,500	,500	.
N	Y	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	X1	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	X2	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	X3	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	X4	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	X5	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	X6	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	X7	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	X8	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	X9	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X9, X8, X2, X7, X4, X3, X1, X6, X5 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2		
1	,872 ^a	,760	,712	1,05355	,760	15,859	9	45	,000	1,018

a. Predictors: (Constant), X9, X8, X2, X7, X4, X3, X1, X6, X5

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158,426	9	17,603	15,859	,000 ^b
	Residual	49,949	45	1,110		
	Total	208,374	54			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X9, X8, X2, X7, X4, X3, X1, X6, X5

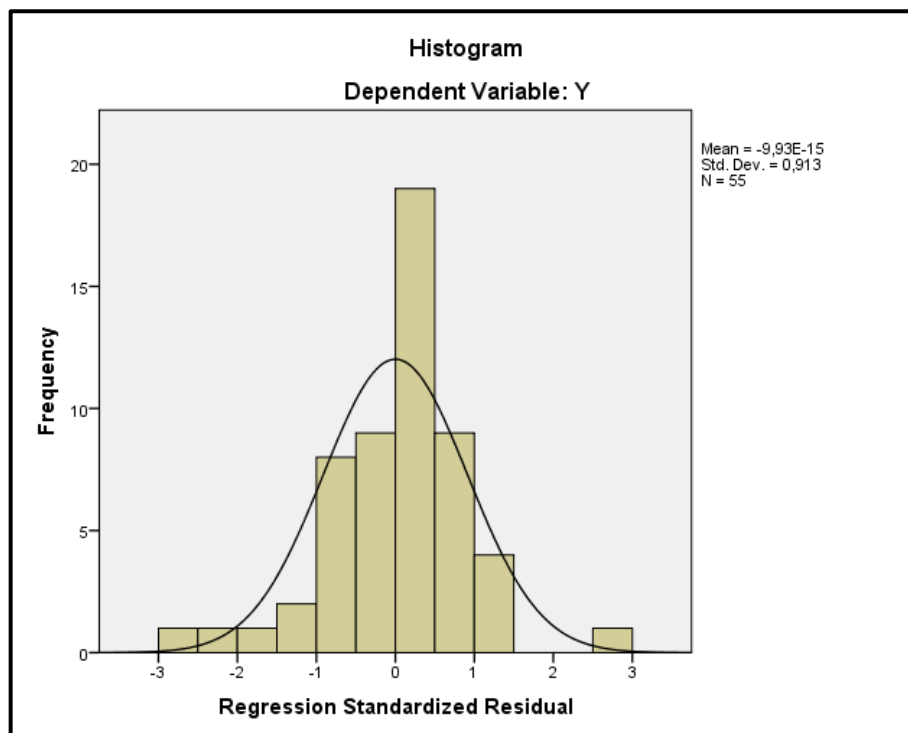
Coefficients^a

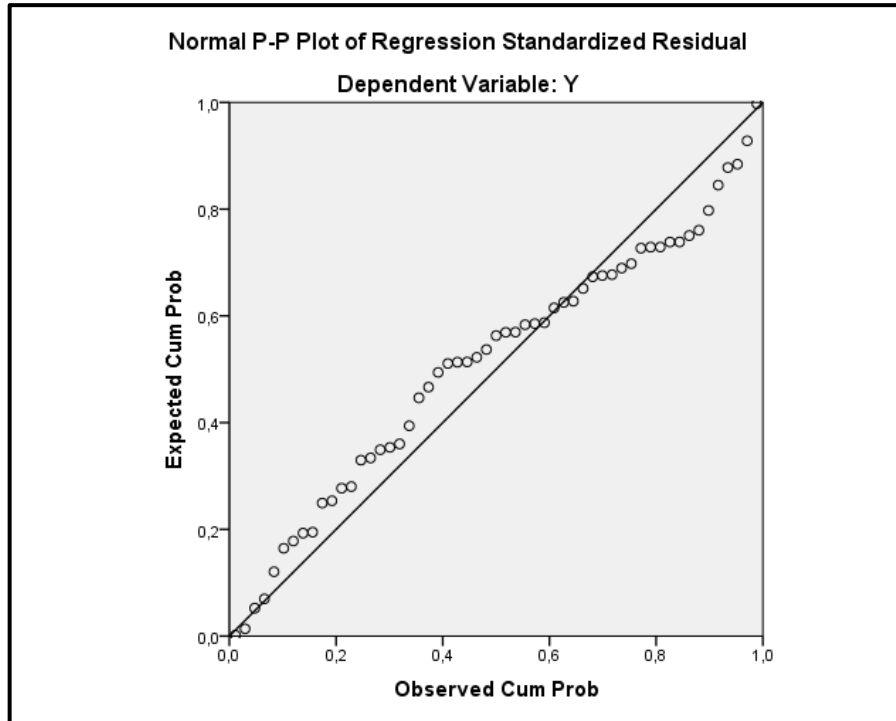
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-76,680	106,258			-,722	,474					
	X1	-,044	,024	-,234	-1,824	,075		-,603	-,262	-,133	,324	3,084
	X2	-,195	,162	-,196	-1,203	,235		,207	-,177	-,088	,200	5,001
	X3	-,978	,160	-1,313	-6,118	,000		-,747	-,674	-,447	,116	8,644
	X4	,010	,007	,142	1,341	,187		-,076	,196	,098	,474	2,111
	X5	-,098	,042	-,530	-2,349	,023		,529	-,331	-,171	,105	9,558
	X6	,185	,529	,055	,349	,729		,004	,052	,025	,214	4,680
	X7	1,764	4,513	,048	,391	,698		,004	,058	,029	,357	2,805
	X8	5,394	6,845	,091	,788	,435		-,005	,117	,058	,404	2,478
	X9	1,615	,413	,370	3,908	,000		-,080	,503	,285	,596	1,678

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7,2987	16,8855	14,6903	1,71284	55
Std. Predicted Value	-4,315	1,282	,000	1,000	55
Standard Error of Predicted Value	,294	,770	,442	,083	55
Adjusted Predicted Value	3,8874	16,7960	14,6478	1,97893	55
Residual	-3,12831	2,98010	,00000	,96176	55
Std. Residual	-2,969	2,829	,000	,913	55
Stud. Residual	-3,305	4,142	,015	1,073	55
Deleted Residual	-3,87470	6,39146	,04252	1,37172	55
Stud. Deleted Residual	-3,755	5,208	,022	1,190	55
Mahal. Distance	3,218	27,840	8,836	4,006	55
Cook's Distance	,000	1,964	,054	,266	55
Centered Leverage Value	,060	,516	,164	,074	55

a. Dependent Variable: Y





Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions										
				(Constant)	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	
1	1	8,054	1,000	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2	1,082	2,729	,00	,00	,00	,04	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,14
	3	,518	3,943	,00	,01	,02	,03	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,44
	4	,181	6,678	,00	,01	,13	,09	,03	,00	,01	,00	,00	,00	,12
	5	,099	9,038	,00	,17	,00	,05	,01	,00	,10	,00	,00	,00	,08
	6	,041	14,032	,00	,08	,03	,07	,43	,00	,06	,00	,00	,00	,20
	7	,025	17,958	,00	,58	,43	,01	,51	,00	,07	,00	,00	,00	,02
	8	,001	83,871	,00	,08	,35	,68	,00	,97	,02	,00	,00	,00	,01
	9	7,255E-6	1053,623	,04	,01	,00	,00	,00	,00	,48	1,00	,04	,04	,01
	10	9,192E-7	2960,033	,96	,06	,04	,02	,01	,02	,26	,00	,96	,96	,00

a. Dependent Variable: Y

Statistics

X9

N	Valid	55
	Missing	0

		X9			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum menerapkan BB	40	72,7	72,7	72,7
	Sudah menerapkan BB	15	27,3	27,3	100,0
Total		55	100,0	100,0	

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96175539
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,110
	Negative	-,112
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,084 ^c
<p>a. Test distribution is Normal.</p> <p>b. Calculated from data.</p> <p>c. Lilliefors Significance Correction.</p>		